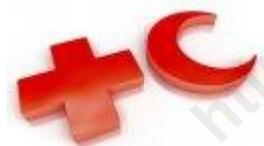


Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2016



Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2016



Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016

No. Katalog : 4101002.34
No. ISSN : 2460-2140
No. Publikasi : 34520 16.07
Ukuran Buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah Halaman : xvi + 78 halaman

Naskah:
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :
UD. Pelangi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian,1994). Pembangunan yang dilakukan dari waktu ke waktu akan membawa perubahan pada masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial termasuk infrastruktur yang ada. Perubahan sosial yang terjadi akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya. Dinamika yang terjadi pada tataran kesejahteraan masyarakat perlu diketahui oleh berbagai pihak. Penyusunan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui dinamika yang terjadi baik dari sisi spasial maupun dari waktu ke waktu.

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016 merupakan output dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016 (Susenas 2016) yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data penduduk disajikan dalam bentuk tabel persentase. Tiap tabel menggolongkan populasi menurut kabupaten/kota, sehingga pengguna data dapat melihat tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota. Pada beberapa tabel ulasan, sajian data dibedakan pula menurut jenis kelamin, agar dapat diketahui perkembangan penduduknya dari sisi gender.

Terbitnya publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna data dari aspek tingkat kesejahteraan penduduk. Disamping itu juga pengguna data dapat mengetahui tingkat perkembangan penduduk dari berbagai dimensi sosial. Publikasi ini juga diharapkan mampu memenuhi keinginan para pengguna data.

Kepada semua pihak yang secara aktif membantu publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Tentunya saran dan masukan sangat diharapkan, agar publikasi mendatang lebih sempurna.

Yogyakarta, Juli 2017

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,**



Johanes De Britto Priyono, M.Sc

<http://yogyakarta.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I.Yogyakarta 2016 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan informasi statistik mengenai keadaan sosial ekonomi hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016 di D.I.Yogyakarta. Data disajikan dalam bentuk tabel persentase dan grafik menurut kabupaten/kota. Pada beberapa tabel ulasan, data yang disajikan dibedakan juga menurut jenis kelamin untuk melihat ada tidaknya perbedaan gender pada aspek tertentu.

Beberapa aspek sosial demografi yang disajikan dalam publikasi ini meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan konsumsi/pengeluaran. Beberapa gambaran pokok mengenai aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Sebanyak 21,48 persen penduduk D.I.Yogyakarta berusia muda (0-14 tahun), 69,33 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan 9,19 persen berusia 65 tahun lebih, sehingga angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 44,24
- Persentase penduduk yang sakit alasan utama tidak berobat jalan selama sebulan terakhir . tidak punya biaya berobat sebesar 0,26 persen. Keluhan yang paling banyak dialami penduduk tidak ada biaya Transport sebesar 0,28 persen , tidak ada sarana transportasi 0,06 persen dan waktu tunggu pelayanan lama 0,03 persen.
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,15 persen. Angka persentase terendah terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 1,34 persen, sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 11,33 persen.
- Alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah AKDR (25,21persen). Sedangkan pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi pria (MOP dan Kondom) hanya 5,28 persen.
- Rumah tangga pada umumnya menempati rumah dengan rata-rata luas lantai seluas 50 – 99 m², yaitu sebesar 39,18 persen.
- Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan 40,52 persen dan bukan makanan sebesar 59,48 persen.

<http://yogyakarta.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Sistematika Penyajian	2
II. METODOLOGI	5
2.1 Ruang Lingkup	5
2.2 Kerangka Sampel	5
2.3 Rancangan Penarikan Sampel	5
2.4 Metode Pengumpulan Data	6
2.5 Pengolahan Data	7
2.6 Konsep dan Definisi	7
III. KEPENDUDUKAN	15
IV. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	23
V. BALITA DAN KESEHATAN	31
VI. PENDIDIKAN	41
VII. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	57
VIII. KONSUMSI/PENGELUARAN	69
IX. KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA LAINNYA	77

DAFTAR TABEL

III. Kependudukan

Tabel 3.1	: Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan rasio jenis kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	19
Tabel 3.2	: Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan di D.I.Yogyakarta, 2016	19
Tabel 3.3	: Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016	20
Tabel 3.4	: Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di D.I.Yogyakarta (Laki-laki), 2016.....	21
Tabel 3.5	: Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di D.I.Yogyakarta (Perempuan), 2016.....	21
Tabel 3.6	: Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di D.I.Yogyakarta (Lk+Pr), 2016.....	22

IV. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Tabel 4.1	: Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di D.I.Yogyakarta, 2016	26
Tabel 4.2	: Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai dan yang Sedang Menggunakan/Memakai Cara/ Alat KB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016.....	26
Tabel 4.3	: Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Cara/Alat KB yang Digunakan/Dipakai di D.I.Yogyakarta, 2016.....	27
Tabel 4.4	: Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang pernah Kawin dan Jumlah Anak Lahir Hidup, Masih Hidup dan Sudah Meninggal di D.I.Yogyakarta, 2016.....	27
Tabel 4.5	: Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup di D.I.Yogyakarta, 2016.....	28
Tabel 4.6	: Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anak yang Masih Hidup di D.I.Yogyakarta, 2016.....	29
Tabel 4.7	: Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anak yang Sudah Meninggal di D.I.Yogyakarta,2016.....	30

V. Balita dan Kesehatan

Tabel 5.1	: Persentase Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Pertama Kelahiran di D.I.Yogyakarta, 2016	34
Tabel 5.2	: Persentase Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Terakhir Kelahiran di D.I.Yogyakarta, 2016	34
Tabel 5.3	: Persentase Anak Usia 2-4 Tahun yang Pernah Disusui menurut Lamanya Disusui dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	35
Tabel 5.4	: Persentase Anak Usia 2-4 Tahun yang Pernah Disusui menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya disusui di D.I.Yogyakarta, 2016.....	35
Tabel 5.5	: Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Imunisasi di D.I.Yogyakarta, 2016.....	36
Tabel 5.6	: Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensinya di D.I.Yogyakarta, 2016.....	36
Tabel 5.7	: Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensinya di D.I.Yogyakarta, 2016.....	37
Tabel 5.8	: Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Hepatitis B menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensinya di D.I.Yogyakarta, 2016.....	38
Tabel 5.9	: Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Bulan Referensi menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit di D.I.Yogyakarta, 2016.....	38
Tabel 5.9	: Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di D.I.Yogyakarta, 2016.....	39
Tabel 5.10	: Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Tempat/Cara Berobat dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016.....	40

VI. Pendidikan

Tabel 6.1	: Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	44
Tabel 6.2	: Persentase Penduduk 7-24 Tahun menurut Golongan Umur, Jenis Kelamin dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta, 2016.....	45

Tabel 6.3	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Bersekolah dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	46
Tabel 6.4	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta (Lk), 2016.....	46
Tabel 6.5	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta (Pr), 2016.....	47
Tabel 6.6	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta (L+P), 2016.....	47
Tabel 6.7	:	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di D.I.Yogyakarta, 2016.....	48
Tabel 6.8	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	48
Tabel 6.9	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di D.I.Yogyakarta (Lk), 2016.....	49
Tabel 6.10	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di D.I.Yogyakarta (Pr), 2016.....	49
Tabel 6.11	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di D.I.Yogyakarta (Lk+Pr), 2016.....	50
Tabel 6.12	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	51
Tabel 6.13	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di D.I.Yogyakarta (Lk), 2016.....	52
Tabel 6.14	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di D.I.Yogyakarta (Pr), 2016.....	53
Tabel 6.15	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (L+P), 2016.....	54
Tabel 6.16	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca/ Menulis dan Jenis kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016.....	55
Tabel 6.17	:	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca Menulis di D.I.Yogyakarta,(L),2016.....	55

Tabel 6.18	: Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca Menulis di D.I.Yogyakarta,(P),2016	56
Tabel 6.19	: Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca Menulis di D.I.Yogyakarta, (L+P), 2016.....	56

VII. Perumahan dan Permukiman

Tabel 7.1	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Luas Lantai Rumah Tempat Tinggal di D.I.Yogyakarta,2016.....	61
Tabel 7.2	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas di D.I.Yogyakarta, 2016	61
Tabel 7.3	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di D.I.Yogyakarta, 2016.....	62
Tabel 7.4	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas di D.I.Yogyakarta, 2016.....	62
Tabel 7.5	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di D.I.Yogyakarta, 2016.....	63
Tabel 7.6	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat di D.I.Yogyakarta, 2016.....	64
Tabel 7.7	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Air Minum di D.I.Yogyakarta, 2016.....	64
Tabel 7.8	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di D.I.Yogyakarta, 2016.....	65
Tabel 7.9	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di D.I.Yogyakarta, 2016.....	65
Tabel 7.10	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di D.I.Yogyakarta, 2016.....	66
Tabel 7.11	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Pembuangan Akhir Tinja di D.I.Yogyakarta, 2016.....	66
Tabel 7.12	: Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di D.I.Yogyakarta, 2016.....	67

Tabel 7.13	: Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016.....	68
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VIII. Konsumsi/Pengeluaran

Tabel 8.1	: Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I.Yogyakarta, 2016.....	71
Tabel 8.2	: Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Tipe Daerah di D.I.Yogyakarta,2016.....	75

IX. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Lainnya

Tabel 9.1	: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di D.I.Yogyakarta, 2016	81
Tabel 9.2	: Persentase Rumah Tangga yang membeli Beras Murah/Raskin Selama 3 Bulan Referensi menurut Jumlah Beras yang Dibeli dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016.....	82
Tabel 9.3	: Persentase Rumah Tangga yang membeli Beras Murah/Raskin Selama 3 Bulan Referensi menurut Harga Beras per Kg dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016.....	83
Tabel 9.4	: Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di D.I.Yogyakarta, 2016.....	84
Tabel 9.5	: Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016.....	85
Tabel 9.6	: Persentase Penduduk yang Bepergian 1 April – 30 Juni 2016 menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Piramida Penduduk D.I.Yogyakarta, 2010.....	18
Gambar 3.2	: Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016.....	18
Gambar 4.1	: Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas yang pada Saat Perkawinan Pertama Berumur Kurang dari 16 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	24
Gambar 4.2	: Proporsi Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Pernah dan Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	25
Gambar 4.3	: Persentase Wanita usia 15-49 Tahun yang Berstatus kawin menurut Alat/Cara KB yang sedang Digunakan menurut Kabupaten/Kota, 2016	25
Gambar 5.1	: Persentase Balita yang pada Persalinan Terakhir Ditolong oleh Dokter atau Bidan menurut Kabupaten/Kota, 2016	33
Gambar 5.2	: Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	33
Gambar 6.1	: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak/ Belum Pernah Sekolah menurut Kabupaten/Kota, 2016	43
Gambar 6.2	: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, 2016	43
Gambar 7.1	: Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap, Lantai, Dinding, dan Kabupaten/Kota, 2016.....	60
Gambar 7.2	: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik dan Lantai Bukan Tanah menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	60
Gambar 8.1	: Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan terhadap Total Makanan, 2016.....	70
Gambar 8.2	: Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Kelompok Non Makanan terhadap Total Non Makanan, 2016.....	70
Gambar 9.1	: Persentase Rumah Tangga yang Kredit usaha selama setahun terakhir menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	79
Gambar 9.2	: Persentase Penduduk yang bepergian 1 April-30 Juni 2016 Menurut Kabupaten/ Kota, 2016.....	79

Gambar 9.3	: Persentase Rumah Tangga yang Membeli Beras Murah/Raskin menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	80
Gambar 9.4	: Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	80

<http://yogyakarta.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 U m u m

Hakekat tujuan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan berbagai program pembangunan yang menyentuh semua masyarakat dan wilayah. Hasil-hasil pembangunan juga diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dinamika pembangunan yang terjadi perlu dituangkan dalam bentuk informasi, sehingga dapat terkomunikasikan kepada semua pihak termasuk pemerintah sendiri. Secara implisit, penyediaan informasi dan data ini sangat melekat kepada Badan Pusat Statistik (BPS). BPS bertanggung jawab atas ketersediaan data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Selain itu dapat pula dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketersediaan tersebut meliputi berbagai aspek termasuk informasi dan data sosial. Kebutuhan data sosial khususnya kesejahteraan rakyat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data tersebut meliputi aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan,

papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja.

Pemenuhan data sosial dilakukan dengan melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas merupakan salah satu survei yang memiliki cakupan data sosial kependudukan yang cukup luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, keluarga berencana, angkatan kerja, sosial ekonomi lainnya, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya.

Susenas dilaksanakan setiap tahun khususnya untuk data pokok (KOR), sehingga data Susenas dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan/perubahan dari tahun ke tahun. Sementara itu Susenas modul akan mengumpulkan jenis data yang berbeda setiap tahun. Keterangan dalam modul dikumpulkan secara bergiliran dalam kurun waktu tiga tahunan. Modul-modul tersebut dikumpulkan dalam tigapaket, yaitumodul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan, modul sosial budaya dan pendidikan, serta modul kesehatan dan perumahan.

Ketersediaan data Susenas setiap tahun menjadi perangkat yang dapat digunakan untuk memantau taraf kesejahteraan masyarakat, Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk merumuskan program pemerintah yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, dan menganalisis dampak berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk.

Data Susenas mempunyai kandungan sangat besar untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan berbagai komponen kesejahteraan dapat disusun berbagai informasi agregat maupun indikator seperti tingkat kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, persentase penduduk menurut status perkawinan, tingkat partisipasi sekolah, persentase penduduk yang buta huruf, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran, persentase akseptor KB, rata-rata umur perkawinan pertama, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, persentase balita yang diberi ASI, persentase rumah tangga yang mempunyai WC dengan tangki septik, rata-rata pengeluaran perkapita dan berbagai informasi ataupun indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut dapat

digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dan alat untuk melihat keadaan, memonitor, serta mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

1.2 Sistematika Penyajian

Data yang disajikan dalam publikasi ini seluruhnya berasal dari kuesioner Kor Susenas 2016 dan penyajian dalam publikasi ini dikelompokkan menjadi sembilan bab. Pada bab satu berisi mengenai gambaran umum dan sistematika penyajian statistik kesra. Bab dua mengenai metode survei yang meliputi ruang lingkup, kerangka sampel, rancangan penarikan sampel, metode pengumpulan data, pengolahan data serta konsep dan definisi.

Bab tiga membahas masalah kependudukan. Datanya disajikan dalam bentuk persentase yang meliputi persentase penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan status perkawinan.

Bab empat menyajikan fertilitas dan keluarga berencana yang menyangkut usia perkawinan pertama, penggunaan alat/cara KB, jumlah anak lahir hidup, masih hidup dan sudah meninggal. Bab lima mengulas masalah balita dan kesehatan, yang antara lain membahas tentang keluhan kesehatan, jumlah hari sakit, pemanfaatan fasilitas kesehatan, penolong kelahiran balita,

pemberian imunisasi dan riwayat pemberian ASI. Bab enam membahas kondisi pendidikan penduduk yang menyangkut status pendidikan, tingkat pendidikan, dan angka melek huruf. Bab tujuh mengenai perumahan dan pemukiman, bab delapan tentang konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, dan di bab terakhir disajikan mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

<http://yogyakarta.bps.go.id>

<http://yogyakarta.bps.go.id>

II. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Susenas 2016 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) dengan ukuran sampel 300.000 rumah tangga yang tersebar di 511 kabupaten/kota di Indonesia. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di blok sensus biasa. Seluruh rumah tangga sampel tersebut di cacah dengan kuesioner VSEN16.K dan VSEN16.KP. Secara nasional pelaksanaan Susenas 2016 mencakup 300.000 rumah tangga. Untuk D.I.Yogyakarta total sampel sebanyak 3.760 rumah tangga yang terdistribusi di seluruh kabupaten/kota.

2.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan susenas, sakernas, dan supas 2016 adalah sekitar 180 000 blok sensus (25 persen populasi) yang di tarik secara pps size rumah tangga SP 2010 dari master frame blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 25 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. 25 persen blok sensus ini di sebut sampling frame induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

2.3 Desain Sampel

2.3.1. Estimasi kabupaten/kota

sampel dipilih dengan metode two stages one phase stratified sampling:

Tahap 1: Memilih 25 persen blok sensus populasi secara probability proportional to size (PPS), dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.

Tahap 2: Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara systematik di setiap strata urban/rural per strata kesejahteraan.

Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic sampling dengan implicit stratification

menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT.

2.3.2. Estimasi Propinsi

Sampel untuk Susenas estimasi provinsi merupakan sub sampel dari Susenas estimasi kabupaten/kota dan dipilih menggunakan metode two stages stratified sampling seperti berikut.

Tahap 1: Memilih 7500 blok sensus secara systematic sampling dari 30.000 blok sensus estimasi kabupaten/kota sesuai dan mempertimbangkan distribusi sampel per strata di tingkat kabupaten/kota

Tahap 2: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakiran secara systematic sampling dengan implicit stratification pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga.

2.3.3 Peta Blok Sensus

Peta blok sensus yang digunakan dalam Susenas 2016 adalah peta hasil *scanning* yang telah digunakan dalam kegiatan pencacahan SP2010. Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda, *landmark*, dan posisi bangunan fisik/sensus. Dengan demikian, peta blok sensus dapat digunakan oleh petugas untuk

menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumah tangga terpilih.

2.3.4 Jumlah Sampel Blok Sensus dan Rumah Tangga

Jumlah sampel blok sensus untuk estimasi kabupaten/kota merupakan minimum sampel untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Sampel blok sensus dialokasikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Alokasi jumlah sampel menurut daerah perkotaan dan perdesaan di setiap kabupaten/kota dilakukan secara proporsional terhadap jumlah KK.

2.3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih

Dalam DSBS Susenas 2016, setiap blok sensus terpilih diberi Nomor Kode Sampel (NKS). NKS Susenas terdiri dari 5 digit yang merupakan nomor urut blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota dan disusun seperti berikut:

00001 – 04999 daerah perdesaan

05001 – 99999 daerah perkotaan

2.4 Metode Pengumpulan Data

Tahun 2016 pengumpulan data Susenas Kor (VSEN16.K) dan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran (VSEN16.KP)

bulan maret 2016 di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan, sedangkan keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan individu yang bersangkutan.

2.5 Pengolahan Data

Pengolahan mulai dari tahap perekaman data (*data entry*), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya. Proses perekaman data kor dilakukan di BPS kabupaten/kota dan BPS D.I.Yogyakarta.

2.6 Konsep dan Definisi

2.6.1 Blok Sensus

Blok Sensus merupakan daerah kerja dari seorang pencacah Susenas 2016. Sesuai dengan kerangka sampel Susenas 2016 blok sensus terpilih sudah ditentukan oleh BPS Pusat dan terdapat pada Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS).

Suatu blok sensus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan)
3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan

Ada 3 jenis blok sensus yaitu:

1. **Blok Sensus Biasa (B)** adalah blok sensus yang sebagian besar muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

2. **Blok Sensus Khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang kecuali lembaga pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain: asrama militer (tangsi) dan daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga.
3. **Blok Sensus Persiapan (P)** adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.

Subblok Sensus adalah bagian dari blok sensus hasil pengelompokan beberapa segmen dalam satu hamparan.

Segmen adalah bagian dari blok sensus yang mempunyai batas jelas. Besarnya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga atau bangunan fisik.

2.6.2 Rumah tangga dan Anggota

Rumah tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Susenas hanya rumah tangga biasa.

Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, dan

biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa di antaranya:

1. Orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya;
2. Orang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;
3. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu blok sensus;
4. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang;
5. Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan jenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.

Rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga (art) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih, atau yang akan tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

2.6.3 Status Perkawinan

Kawin adalah mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup

bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sedangkan wanita yang mengaku belum kawin tetapi pernah hamil dianggap cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

2.6.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut **lahir mati**.

Medis Operasi Wanita (MOW/ Sterilisasi Wanita/Tubektomi) adalah operasi yang dilakukan pada wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu mengikat saluran telur agar wanita itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk memberikan perlindungan agar wanita tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi

disini hanya operasi yang ditujukan agar seorang wanita tidak bisa mempunyai anak lagi.

Medis Operasi Pria (MOP/Sterilisasi Pria/Vasektomi) adalah suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya.

IUD (*intra uterus device*)/AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim)/spiral adalah alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB adalah salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu ke dalam tubuh, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali (cara ini disebut juga *depo provera*).

Pil KB adalah pil yang diminum untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus diminum secara teratur setiap hari. Orang dikatakan sedang menggunakan pil KB, apabila sejak haid terakhir ia minum pil KB setiap hari.

Kondom/karet KB adalah alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istri/pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir

pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul termasuk saat kumpul terakhir (jadi ia terlindung).

Norplant/implant/susuk KB adalah enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang di tubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan.

Lainnya, antara lain intravag (tisu KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul).

Alat/cara tradisional antara lain pantang berkala/sistem kalender, senggama terputus, tidak campur, jamu, urut.

2.6.5 Kesehatan

Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin berusia 5 bulan ke atas (bila kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran) dari dalam kandungan ke dunia luar, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.

Penolong pertama kelahiran adalah seseorang yang pertama kali menolong proses kelahiran langsung waktu anak tersebut akan dilahirkan.

Penolong terakhir kelahiran adalah seseorang yang terakhir menolong proses

kelahiran langsung sampai anak tersebut selesai dilahirkan.

Menyusui adalah jika puting susu ibu yang dihisap bayi mengeluarkan air susu yang diminum oleh bayi, walaupun hanya sedikit. Ibu menyusui bisa ibu kandung maupun bukan ibu kandung dan bayi minum ASI melalui botol dikategorikan diberi ASI.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien.

Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat

pelayanan kesehatan modern atau tradisional dengan menginap minimal 1 malam.

2.6.6 Pendidikan

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun non formal (Paket A/B/C) mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah aktif terdaftar dan mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang formal maupun non formal.

Masih bersekolah adalah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal maupun non formal di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal atau non formal dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah.

Kemampuan baca tulis adalah kemampuan seseorang untuk dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin, demikian juga orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang dapat membaca atau menulis saja dianggap tidak bisa membaca dan menulis.

2.6.7 Perumahan

Luas lantai (m^2) adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai dibagi banyaknya rumahtangga ditambah luas lantai pribadi dari rumah tangga bersangkutan.

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga bangunan lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM. Tidak termasuk rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa leding tetapi sebelum dialirkan tidak melalui proses penjernihan dan penyehatan.

Air Sumur/Perigi terlindung bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur atau perigi.

Kloset/dudukan leher angsa adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cemplung/Cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.

Lainnya adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.

2.6.8 Konsumsi/Pengeluaran

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan

usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran bukan makanan setahun dan sebulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

2.6.9 Keterangan Sosial Ekonomi

Lainnya

Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan/berobat, pemeriksaan KB, pemasangan alat KB, melahirkan, termasuk rawat inap.

Pelayanan kesehatan gratis adalah pemeriksaan kesehatan/berobat, pemeriksaan KB, pemasangan alat KB, melahirkan, termasuk rawat inap yang tidak dikenakan biaya atau hanya dikenakan biaya administrasi saja.

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin/tidak mampu.

Kartu sehat adalah kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dengan maksud membantu masyarakat miskin (tidak mampu). Kartu sehat ini digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas) tanpa dipungut biaya, satu keluarga mempunyai satu kartu sehat yang di dalamnya memuat daftar anggota keluarganya, dan setiap anggota keluarga bisa mempergunakannya.

Surat Miskin (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan dengan maksud memperoleh keringanan biaya bagi penduduk.

Lainnya seperti: Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) adalah program bantuan sosial bidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat miskin di wilayahnya. Pengelola Jamkesda adalah Dinas Kesehatan di daerah setempat dan asuransi di daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

III. KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, serta modal dasar, kekuatan, sasaran, pelaku, dan sekaligus tujuan pembangunan (Inpres No. 14 Tahun 1999). Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi modal dasar, kekuatan dan pelaku pembangunan. Namun, sebaliknya kuantitas penduduk yang besar dengan kualitas rendah dapat menjadi penghambat pembangunan.

Penduduk merupakan potensi tenaga kerja yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi, tetapi di lain pihak penduduk juga memerlukan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, persebaran penduduk yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, akan menjadi masalah dan beban bagi masyarakat dan negara yang bersangkutan.

Perkembangan penduduk, dan kuantitas penduduk perlu dikendalikan, Kualitas penduduk perlu dikembangkan dan mobilitas penduduk perlu diarahkan. Penduduk yang sedemikian ini akan menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan

nasional. Hal tersebut juga di tujukan bagi guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk D.I.Yogyakarta tahun 2016 sebanyak 3 710 443 jiwa, terdiri dari 1 834 023 laki-laki dan 1 876 419 perempuan.

Secara umum persentase penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki yaitu 50,57 persen berbanding 49,43 persen (Tabel 3.1). Sementara itu komposisi penduduk D.I.Yogyakarta berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk menunjukkan bahwa proporsi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 20 sd 24 (20-24) tahun (Gambar 3.1).

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Nilai ini menggambarkan komposisi jenis kelamin. Semakin besar nilainya menunjukkan

bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

D.I.Yogyakarta, rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 97,74, artinya setiap 100 perempuan ada 97 penduduk laki laki. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota hanya di Kabupaten Sleman saja yang mempunyai *Sex Ratio* lebih dari 100 (101,69). Hal ini terlihat jelas dari persentase penduduk di mana perempuan mencapai 50,57 persen dan laki-laki sebesar 49,69 persen, sedangkan di Kabupaten Sleman 49,58 persen penduduk perempuan dan penduduk laki-laki mencapai 50,42 persen (Tabel 3.1).

Struktur penduduk menggambarkan kondisi penduduk menurut kelompok tertentu. Sedangkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan dari kelompok usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif.

Berdasarkan struktur umur penduduk seperti terlihat pada Tabel 3.2, pada 2016 lebih dari separuh penduduk D.I.Yogyakarta berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), yaitu mencapai 69,33 persen. Penduduk usia muda (0-14 tahun) tercatat sebesar 21,48 persen dan

penduduk kelompok usia tua (65 tahun ke atas) tercatat sebanyak 9,19 persen (Tabel 3.2). Struktur penduduk tersebut akan mempengaruhi angka beban ketergantungan.

Tingginya persentase penduduk usia muda dan tua ini dapat menjadi beban yang berarti bagi penduduk usia produktif. Semakin banyak penduduk usia muda maupun tua, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Semakin banyak penduduk usia produktif dan berkurangnya penduduk usia muda dan tua (tidak produktif), maka akan menurunkan angka beban ketergantungan. Artinya semakin sedikit beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dan pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengalokasikan dana dalam usaha produktif semakin besar.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) pada 2016 mencapai 44,24 berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 44 penduduk kelompok umur muda dan kelompok umur tua.

Proporsi penduduk usia produktif tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta (74,45 persen) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul (65,45 persen). Hal ini

menunjukkan bahwa angka ketergantungan di Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan di Kabupaten Gunungkidul.

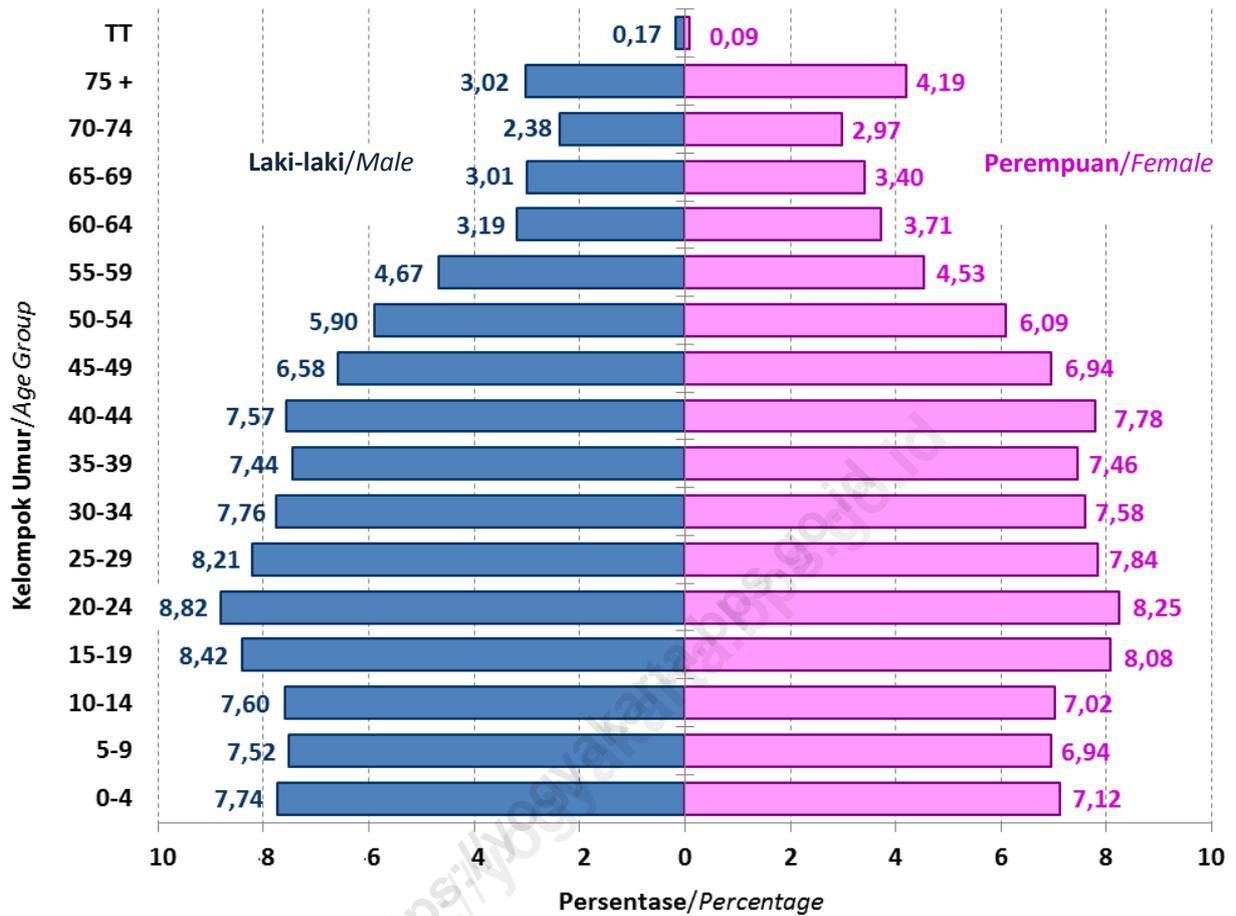
Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 3.3. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk terbanyak berada pada kelompok pemuda (15-24 tahun), di mana kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 7,27 persen dan kelompok umur 20-24 tahun 9,42 persen.

Status perkawinan merupakan salah satu variabel yang mencerminkan tingkat kesejahteraan secara immaterial. Makin tinggi persentase penduduk dengan status cerai hidup maka semakin terlihat bahwa semakin tidak kokohnya kualitas rumah tangga dalam masyarakat.

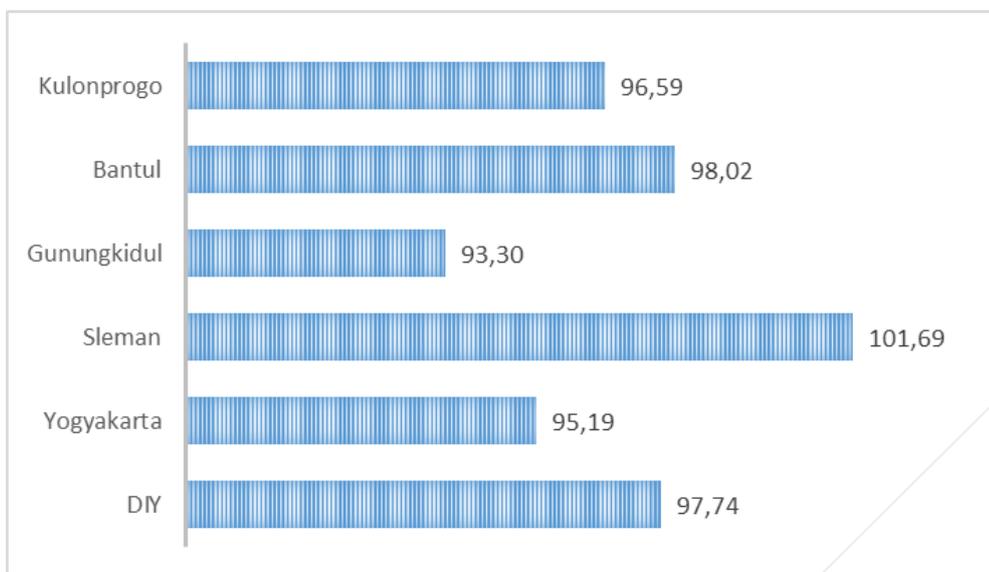
Komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki lebih besar

dibandingkan perempuan, yaitu 35,70 persen berbanding 26,45 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) pada kelompok perempuan sebesar 14,01 persen, jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya 4,44 persen (Tabel 3.4 dan 3.5). Persentase penduduk perempuan berstatus cerai relatif tinggi di Kabupaten Kulonprogo (18,13 persen) dan Kabupaten Gunungkidul (15,66 persen). Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk D.I.Yogyakarta, 2010



Gambar 3.2 Sex Ratio menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta 2016



Tabel 3.1 Distribusi Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	49,13	50,87	100,00	96,59
Bantul	49,50	50,50	100,00	98,02
Gunungkidul	48,27	51,73	100,00	93,30
Sleman	50,42	49,58	100,00	101,69
Yogyakarta	48,77	51,23	100,00	95,19
D,I, Yogyakarta	49,43	50,57	100,00	97,74

Tabel 3.2 Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Angka Ketergantungan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	0 - 14	15 - 64	65 +	Jumlah	Dependency Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	22,50	66,07	11,43	100,00	51,34
Bantul	22,16	69,12	8,71	100,00	44,67
Gunungkidul	21,34	65,45	13,21	100,00	52,80
Sleman	21,47	71,21	7,32	100,00	40,43
Yogyakarta	19,14	74,45	6,41	100,00	34,32
D.I. Yogyakarta	21,48	69,33	9,19	100,00	44,24

Tabel 3.3 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
0 – 4	7,01	7,00	7,01
5 – 9	8,01	7,08	7,54
10 – 14	7,30	6,58	6,93
15 – 19	7,41	7,14	7,27
20 – 24	9,70	9,14	9,42
25 – 29	7,47	6,97	7,22
30 – 34	7,33	7,19	7,26
35 – 39	7,36	7,23	7,29
40 – 44	6,53	7,22	6,88
45 – 49	7,58	7,19	7,38
50 – 54	5,64	6,36	6,01
55 – 59	6,15	6,06	6,10
60+	12,51	14,84	13,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.4 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Status perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Kulonprogo	30,74	63,63	1,40	4,23	100,00
Bantul	34,03	60,77	1,15	4,05	100,00
Gunungkidul	27,72	68,55	0,46	3,27	100,00
Sleman	40,45	55,43	1,18	2,94	100,00
Yogyakarta	44,31	52,12	1,09	2,48	100,00
D.I. Yogyakarta	35,70	59,87	1,05	3,39	100,00

Tabel 3.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Status perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Kulonprogo	21,80	61,68	2,15	14,38	100,00
Bantul	25,16	61,05	2,42	11,38	100,00
Gunungkidul	17,38	66,57	1,97	14,08	100,00
Sleman	30,83	56,84	2,48	9,85	100,00
Yogyakarta	37,89	49,05	3,24	9,82	100,00
D.I. Yogyakarta	26,45	59,53	2,41	11,60	100,00

Tabel 3.6 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Status perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Kulonprogo	26,16	62,63	1,78	9,43	100,00
Bantul	29,54	60,91	1,79	7,76	100,00
Gunungkidul	22,32	67,52	1,25	8,91	100,00
Sleman	35,67	56,13	1,82	6,38	100,00
Yogyakarta	40,99	50,54	2,20	6,27	100,00
D.I. Yogyakarta	31,00	59,70	1,74	7,57	100,00

IV. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu variabel pertumbuhan penduduk alami. Sementara itu tingkat kelahiran dipengaruhi oleh umur perkawinan pertama, aborsi, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Usia perkawinan pertama seorang wanita akan berpengaruh pada resiko melahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama, maka semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan bagi ibu maupun anaknya., Hal ini disebabkan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin, dan belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/melahirkan. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi usia perkawinan pertama, maka resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan juga semakin tinggi.

Program nasional keluarga berencana selain bertujuan menekan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, semakin banyak akseptor KB diharapkan tingkat fertilitas akan semakin rendah dan taraf kesejahteraan ibu dan anak semakin baik. Pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan program Keluarga Berencana sejak tahun 1971.

Tabel 4,1 menunjukkan persentase wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama. Secara umum modus usia perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (54,16 persen). Hal ini diduga kesadaran dan

pemahaman wanita terhadap resiko perkawinan usia muda semakin baik, sehingga mendorong mereka tidak melakukan perkawinan dibawah umur (perkawinan muda. Walaupun demikian masih juga dijumpai wanita yang melakukan perkawinan muda. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang dari usia 16 tahun yang sebesar 3,30 persen. Perkawinan di bawah umur ini terdapat di semua kabupaten/kota, dan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 6,56 persen, sedangkan terendah ada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 1,57 persen. Secara lengkap, urutan persentase perkawinan wanita di bawah usia 16 tahun menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar 4,1

Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar, Wanita yang umurnya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka peluang banyaknya anak yang dilahirkan disuatu wilayah juga semakin besar, Semakin banyak jumlah anak, semakin besar pula tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu pengaturan jumlah anak perlu diperhatikan agar terciptanya keluarga yang sejahtera dapat diwujudkan.

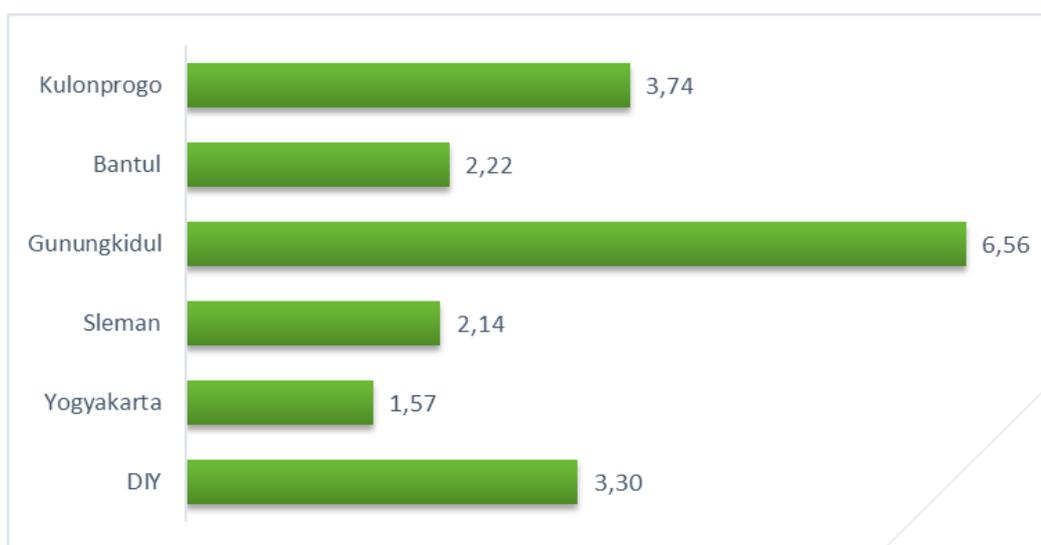
Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tabel 4.2 terlihat bahwa besarnya persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB sebesar 65,56 persen. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, nilai persentase tersebut hampir sama. Persentase tertinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 72,82 persen dan yang terendah di Kota Yogyakarta 57,28 persen (lihat gambar 4,2).

Pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tersebut, ada diantaranya yang sedang menggunakan/memakai alat KB (Tabel 4,2) yang sebesar 65,56 persen. Dibandingkan dengan alat KB lainnya, AKDR/ IUD/Spiral

dan kondom lebih banyak digunakan oleh wanita usia 15-49 tahun dengan persentase 25,21 persen dan 11,48 untuk Pemakaian alat KB Pil (Gambar 4,3), Penggunaan alat KB Tradisional menempati urutan ketiga dengan persentase 7,41 persen, kemudian disusul Kondom 4,91 persen, MOW 4,73 persen dan Susuk KB 4,61 persen, alat KB Sutik 4,61 persen sementara peran pria dalam ber-KB masih rendah yaitu MOP hanya 0,37 persen.

Persentase pemakaian alat KB bervariasi antar kabupaten/kota. Pemakaian tertinggi AKDR/IUD/Spiral ada di Kota Yogyakarta (38,18 persen), persentase tertinggi pemakaian Pil KB terdapat di Kabupaten Bantul (13,77 persen), sedangkan persentase pemakaian Cara Tradisional tertinggi di Kabupaten Kulonprogo (11,35 persen).

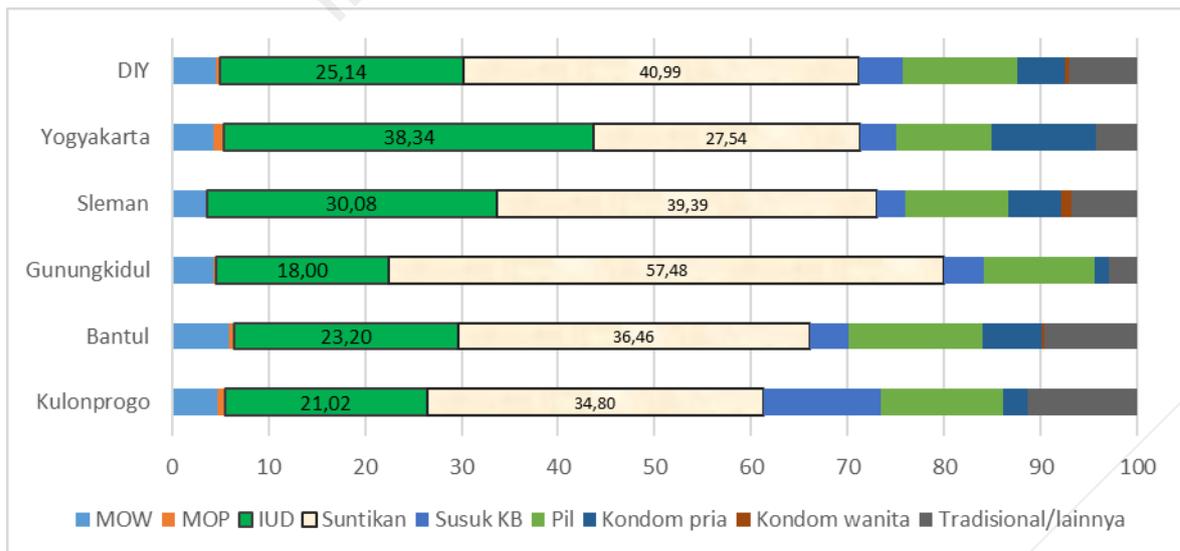
Gambar 4.1 Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang pada Saat Perkawinan Berumur Kurang Dari 16 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 4.2 Proporsi Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 4.3 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin menurut Alat/Cara KB yang Digunakan dan Kabupaten/Kota, 2016



Tabel 4.1 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Umur perkawinan pertama					Jumlah
	10 - 15	16	17 - 18	19 - 24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	3,74	4,58	14,59	52,70	24,40	100,00
Bantul	2,22	4,36	14,30	56,40	22,72	100,00
Gunungkidul	6,56	7,01	19,58	53,84	13,01	100,00
Sleman	2,14	1,65	11,59	53,97	30,64	100,00
Yogyakarta	1,57	2,76	9,59	51,17	34,91	100,00
D.I. Yogyakarta	3,30	4,04	14,28	54,16	24,23	100,00

Tabel 4.2 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai dan yang Sedang Menggunakan/Memakai Cara/Alat KB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Pernah Menggunakan/ Memakai Cara/Alat KB	Sedang Menggunakan/ Memakai Cara/Alat KB
(1)	(2)	(3)
Kulonprogo	15,46	56,61
Bantul	7,08	62,25
Gunungkidul	11,77	62,48
Sleman	6,48	55,80
Yogyakarta	8,58	52,04
D.I.Yogyakarta	8,93	58,70

Tabel 4.3 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Cara/Alat KB yang Digunakan/Dipakai di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB							
	MOW	MOP	AKDR	Suntika n	Susuk KB	Pil KB	Kondom	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kulonprogo	4,69	0,76	21,02	12,14	12,14	12,73	2,51	11,35
Bantul	6,15	0,56	23,07	4,24	4,24	13,77	6,14	9,80
Gunungkidul	4,34	0,17	17,85	4,17	4,17	11,35	1,45	2,89
Sleman	3,59	0,00	30,60	2,83	2,83	10,65	5,41	7,84
Yogyakarta	4,76	1,03	38,18	3,78	3,78	9,80	10,79	4,23
D.I. Yogyakarta	4,73	0,37	25,21	4,61	4,61	11,87	4,91	7,41

Tabel 4.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Jumlah Anak Lahir Hidup, Masih Hidup dan sudah Meninggal di D.I.Yogyakarta, 2016

Jumlah Anak yang dilahirkan	Anak Lahir Hidup	Anak Masih Hidup	Anak sudah meninggal/
(1)	(2)	(3)	(4)
0	7,83	8,19	96,26
1	34,47	35,14	3,35
2	38,52	39,19	0,28
3	14,85	13,85	0,09
4	3,37	2,86	0,02
5	0,51	0,42	0,00
6	0,21	0,21	0,00
7	0,25	0,14	0,00
8+	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.5 Persentase Wanita Berumur 15-45 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup di D.I.Yogyakarta, 2016

Jumlah Anak Dilahirkan Hidup	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	7,80	7,94	5,19	9,10	9,00	7,83
1	34,57	35,54	36,02	33,32	31,75	34,47
2	37,39	37,63	40,15	39,62	35,51	38,52
3	16,43	13,14	14,03	15,42	17,75	14,85
4	3,82	4,88	3,41	1,39	4,72	3,37
5	0,00	0,59	0,92	0,14	0,29	0,51
6	0,00	0,27	0,29	0,07	0,50	0,21
7	0,00	0,00	0,00	0,66	0,50	0,25
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I. Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anak yang Masih Hidup di D.I.Yogyakarta, 2016

Jumlah Anak yang Masih Hidup	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	7,98	8,32	6,19	9,22	9,00	8,19
1	34,91	35,78	37,41	33,84	33,03	35,14
2	40,04	39,11	39,79	39,81	35,29	39,19
3	13,52	12,08	13,39	14,63	17,66	13,85
4	3,54	3,86	2,46	1,71	3,73	2,86
5	0,00	0,59	0,57	0,27	0,56	0,42
6	0,00	0,27	0,19	0,07	0,72	0,21
7	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,14
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I. Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.7 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anak yang Sudah Meninggal di D.I.Yogyakarta, 2016

Jumlah Anak yang Sudah Meninggal	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	96,21	95,97	93,71	98,26	96,10	96,26
1	3,42	3,96	5,53	1,24	3,68	3,35
2	0,37	0,07	0,55	0,27	0,21	0,28
3	0,00	0,00	0,10	0,22	0,00	0,09
4	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I. Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

V. BALITA DAN KESEHATAN

Tujuan pembangunan bidang kesehatan antara lain agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum. Melalui upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup manusianya. Muara akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pada gilirannya esehatan balita juga tidak lepas dari kesejahteraan keluarganya. Disamping itu juga kesehatan balita dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dan faktor penolong kelahiran. Kualitas penolong kelahiran berpengaruh erat terhadap keselamatan bayi yang dilahirkan dan ibu yang melakukan persalinan.

Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persentase penolong kelahiran balita pada persalinan yang terakhir disajikan pada Tabel 5.1 . Tabel 5.1 menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar penolong kelahiran terakhir balita dilakukan oleh Dokter (51,90

persen) dan Bidan (41,78 persen). Pola yang sama juga terjadi jika dilihat menurut kabupaten/kota.

Peranan dukun sebagai penolong kelahiran masih dijumpai di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di Kota Yogyakarta dukun sebagai penolong kelahiran terakhir sebesar 3,63 persen. Sementara itu peranan dukun sebagai penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Sleman sebesar 3,36 persen, dan untuk kabupaten/kota yang lainnya sebesar 0,00 persen.

Pembinaan anak di bawah lima tahun (Balita) ditujukan untuk peningkatan mutu gizi kesehatan dan perkembangan anak. Upaya ini dapat dipenuhi dengan pemberian air susu ibu (ASI). Pemberian ASI sangat penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Pemberian ASI dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Selain sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi dengan meningkatnya berat badan bayi, ASI juga mengandung zat penolak/ pencegah penyakit. Di samping itu pemberian ASI kepada bayi memberikan rasa aman dan terciptanya hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi yang disusui.

Sebagian besar ibu-ibu telah menyadari betapa pentingnya ASI dan cara membangun emosional dengan anak sejak dalam buaian. Hal ini diperkuat dengan data rata-rata lama pemberian ASI yang dilakukan oleh seorang ibu.

Distribusi anak berumur 2 tahun menurut lamanya disusui dapat dilihat pada Tabel 5.3. Rata-rata lama pemberian ASI anak-anak di D.I. Yogyakarta terlihat cukup tinggi. Dari populasi anak berumur 2 tahun terlihat bahwa yang disusui kurang dari atau sama dengan <12 bulan sebesar 54,54 persen, dan yang lamanya 16-19 bulan hanya sebesar 17,47 persen.

Rata-rata lama disusui cukup bervariasi antar kabupaten/kota. Lamanya pemberian ASI yang ideal adalah 20-23 bulan. Persentase tertinggi anak berusia 2 tahun yang disusui selama 20-23 bulan adalah di Kabupaten Kulonprogo (16,79 persen) dan terendah di Kota Yogyakarta (1,75 persen).

Selain melalui pemberian ASI, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara melakukan imunisasi kepada balita. Secara umum persentase balita yang pernah mendapat imunisasi cukup tinggi yaitu di atas 79,58 persen untuk semua jenis imunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B). Adapun balita yang telah mendapat imunisasi DPT, Polio, dan Hepatitis B minimal 3 kali masing-masing sebesar 92,67 persen, 93,50 persen, dan 90,97 persen (Tabel 5.5, 5.6, dan 5.7).

Pemerintah melalui program-program pembangunan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran berperilaku

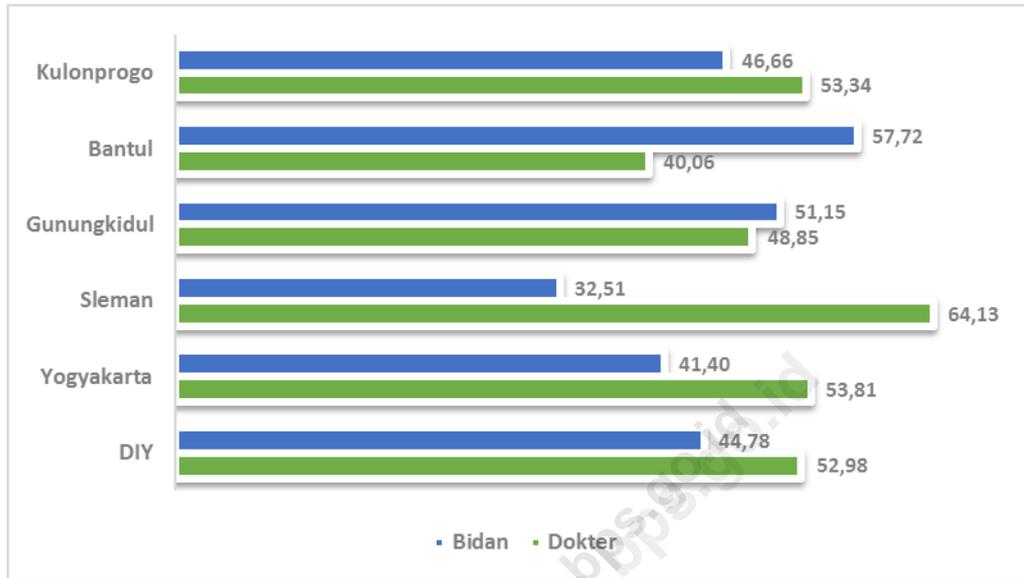
hidup sehat, sehingga derajat kesehatan masyarakat mampu ditingkatkan.

Penduduk yang sakit adalah mereka yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari. Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa lebih dari separuh (58,22 persen) penduduk di D.I. Yogyakarta yang sakit dan mengalami sakit kurang dari 3 hari, Sementara itu untuk kasus yang sama yaitu mengalami sakit antara 4-7 hari sebesar 29,41 persen, seperti terlihat pada Tabel 5.9.

Dalam upaya pemulihan kesehatan, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan banyak yang melakukan cara berobat sendiri daripada yang berobat jalan. Persentase penduduk yang berobat sendiri sebesar 61,50 persen, sedangkan yang berobat jalan sebesar 34,68 persen (Tabel 5.10).

Fasilitas kesehatan yang relatif banyak dimanfaatkan penduduk untuk berobat jalan (Tabel 5.11) adalah praktek dokter sebesar 38,39 persen, Puskesmas/Pustu sebesar 30,75 persen, dan petugas UKBM sebesar 0,50 persen. Sedangkan persentase penduduk yang berobat di rumah sakit swasta tercatat sedikit lebih banyak daripada yang berobat jalan di rumah sakit pemerintah, yaitu masing-masing sebesar 14,36 persen dan 9,13 persen.

Gambar 5.1 Persentase Balita yang pada Persalinan Terakhir Ditolong oleh Dokter atau Bidan menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 5.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota, 2016



Tabel 5.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir					Jumlah
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Dukun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	53,34	0,00	46,66	0,00	0,00	100,00
Bantul	39,12	0,94	57,72	2,21	0,00	100,00
Gunungkidul	47,37	1,48	51,15	0,00	0,00	100,00
Sleman	64,13	0,00	32,51	0,00	3,36	100,00
Yogyakarta	49,05	4,76	41,40	1,17	3,63	100,00
D.I. Yogyakarta	51,90	1,07	44,78	0,67	1,57	100,00

Tabel 5.2 Persentase Anak Usia ≤ 2 Tahun yang Pernah Disusui menurut Lamanya Disusui dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 12	51,19	58,53	54,54
12 – 15	20,86	14,20	17,82
16 – 19	15,78	19,47	17,47
20 – 23	12,17	7,80	10,18
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 5.3 Persentase Anak Usia ≤ 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Lamanya Disusui dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Lamanya disusui (Bulan)				Jumlah
	≤ 12	12 - 15	16 - 19	20 - 23	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Kulonprogo	52,88	19,79	10,54	16,79	100,00
Bantul	46,28	12,82	26,43	14,46	100,00
Gunungkidul	50,06	23,72	15,69	10,54	100,00
Sleman	59,40	16,77	16,10	7,73	100,00
Yogyakarta	64,27	20,60	13,38	1,75	100,00
D.I. Yogyakarta	54,54	17,82	17,47	10,18	100,00

Tabel 5.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	98,29	94,53	96,42	84,87	95,07
Bantul	99,29	94,55	96,90	83,79	95,45
Gunungkidul	97,95	93,55	94,68	81,59	98,17
Sleman	93,19	92,75	92,66	73,07	93,06
Yogyakarta	96,99	93,21	90,07	80,46	97,37
D.I. Yogyakarta	96,65	93,64	94,36	79,58	95,26

Catatan: Khusus Balita yang mempunyai buku imunisasi.

Tabel 5.5 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensinya di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Frekuensi memperoleh Imunisasi DPT			Jumlah
	1	2	3+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	2,69	1,92	95,38	100,00
Bantul	3,19	3,51	93,30	100,00
Gunungkidul	1,45	4,39	94,16	100,00
Sleman	3,02	4,19	92,79	100,00
Yogyakarta	2,51	7,81	89,69	100,00
D,I, Yogyakarta	2,70	4,13	93,17	100,00

Tabel 5.6 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensinya di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Frekuensi memperoleh Polio			Jumlah
	1	2	3+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1,77	4,23	94,01	100,00
Bantul	3,22	1,56	95,22	100,00
Gunungkidul	2,48	3,12	94,39	100,00
Sleman	3,44	4,71	91,85	100,00
Yogyakarta	2,55	5,59	91,86	100,00
D.I. Yogyakarta	2,94	3,56	93,50	100,00

Tabel 5.7 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Hepatitis B menurut Kabupaten/Kota dan Frekuensinya di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Frekuensi memperoleh Hepatitis B			Jumlah
	1	2	3+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	8,27	3,13	88,59	100,00
Bantul	4,71	4,77	90,52	100,00
Gunungkidul	7,38	6,14	86,48	100,00
Sleman	2,97	2,16	94,87	100,00
Yogyakarta	7,98	1,28	90,74	100,00
D.I. Yogyakarta	5,34	3,63	91,04	100,00

Tabel 5.8 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Bulan Referensi menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Sakit					Jumlah
	≤ 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	60,13	29,16	3,67	1,61	5,44	100,00
Bantul	59,47	30,27	4,31	1,04	4,90	100,00
Gunungkidul	57,92	28,44	5,74	4,03	3,88	100,00
Sleman	57,54	28,39	6,46	3,41	4,19	100,00
Yogyakarta	55,57	33,24	3,30	1,40	6,49	100,00
D,I, Yogyakarta	58,22	29,41	5,14	2,57	4,66	100,00

Tabel 5.9 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan			
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	0,45	0,00	0,09	0,15
Bantul	0,00	1,10	0,00	0,00
Gunungkidul	0,27	0,00	0,00	0,00
Sleman	0,47	0,00	0,12	0,00
Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,14
D.I. Yogyakarta	0,26	0,28	0,06	0,03

Tabel 5.9 Persentase Penduduk yang Sakit tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di D.I.Yogyakarta, 2016

Lanjutan

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan/			
	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kulonprogo	66,76	0,43	30,26	1,86
Bantul	67,20	0,22	28,73	2,75
Gunungkidul	46,57	0,00	50,05	3,11
Sleman	61,10	0,00	34,36	3,95
Yogyakarta	63,49	0,00	34,04	2,33
D.I. Yogyakarta	61,50	0,11	34,68	3,08

Tabel 5.10 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Tempat/Cara Berobat dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Tempat/Cara Berobat	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RS Pemerintah	9,07	6,95	10,99	8,55	12,21	9,13
RS Swasta	10,36	13,01	8,81	21,22	17,46	14,36
Praktek Dokter/ Bidan	36,54	41,91	44,95	37,74	16,68	38,39
Klinik/ Praktek Dokter bersama	10,39	13,50	9,36	11,86	9,89	11,37
Puskesmas/Pustu	35,95	29,48	34,98	20,57	44,71	30,75
UKBM	0,53	0,71	0,00	0,74	0,35	0,50
Tradisional	2,40	0,75	0,62	1,68	0,69	1,20
Lainnya	0,84	0,56	0,63	0,87	0,35	0,68

VI. PENDIDIKAN

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari profil pendidikan penduduk antara lain melalui partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kemampuan membaca dan menulis.

Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator *output* dari program pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin baik juga kualitas suatu masyarakat. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan memudahkan mereka untuk memahami perubahan ilmu dan teknologi serta kemampuan beradaptasi termasuk menyerap perubahan atau infiltrasi perubahan.

Partisipasi penduduk bersekolah disajikan berdasarkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Secara umum persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 5,15 persen. Dari jumlah tersebut ternyata penduduk perempuan jauh lebih banyak penduduk laki-laki, yaitu masing-masing mencapai 7,67 persen dan 2,54 persen (Tabel 6.3). Apabila dilihat tipe daerahnya, pada daerah yang bersifat *urban*, persentase yang belum/tidak pernah sekolah relatif kecil

dibanding daerah *rural*. Penduduk usia 10 tahun ke atasnya yang belum/tidak pernah sekolah di Kota Yogyakarta hanya 0,36 persen, sedang Kabupaten Gunung Kidul yang bersifat *rural* mencapai 11,33 persen (Tabel 6.6).

Berdasarkan usia sekolah, partisipasi sekolah seperti diperlihatkan pada Tabel 6.2 yaitu bahwa penduduk yang belum/tidak pernah bersekolah pada kelompok umur 7-12 tahun sebanyak 0,16 persen, sedangkan pada kelompok umur 13-15 sudah mencapai 0,11 persen, Sementara itu pada kelompok umur 16-18 tahun 0,14 persen dan 19-24 tahun 0,21 persen.

Berdasarkan Tabel 6.8, penduduk berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah sebesar 21,52 persen, dengan rincian yang bersekolah di SD/MI sebesar 5,36 persen, SMP/MTs sebesar 4,58 persen, SMU/SMK/MA sebesar 4,41 persen dan Akademi/Universitas sebesar 7,17 persen,

Pada tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) tidak hanya yang berasal dari pendidikan formal saja, tetapi ditambah dengan mereka yang bersekolah di non formal (Paket A,B,C), Demikian juga halnya dengan angka partisipasi murni (APM), termasuk yang masih sekolah di non formal pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah/angka partisipasi sekolah (APS) ditampilkan pada Tabel 6.2. APS dibagi menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili usia sekolah SD, 13-15 tahun mewakili usia sekolah SMP, dan 16-18 tahun mewakili usia SMU.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,84 persen, APS kelompok umur 13-15 tahun 99,62 persen, dan APS kelompok umur 16-18 tahun sebesar 87,20 persen. Apabila diperhatikan berdasarkan jenis kelamin, APS perempuan sedikit lebih tinggi pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun, sementara pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian semakin tinggi kelompok umur akan semakin rendah APS, baik bagi laki-laki maupun perempuan,

Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, bervariasi antara golongan umur dan jenis kelamin. APM SD/MI sebesar 99,21 persen, SMP/MTs sebesar 83,05 persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 69,86 persen (Tabel 6.7).

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk maka semakin tinggi taraf intelektualitas penduduknya. Pada Tabel 6.12 dapat dilihat bahwa penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki ijazah adalah sebesar 19,00 persen, tamat SD/ sederajat sebesar 22,67 persen, tamat SMP/ sederajat sebesar 14,19 persen, tamat SMU/ sederajat sebesar 33,18 persen, dan tamat Diploma I sampai dengan universitas sebesar 11,85 persen. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah/STTB relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

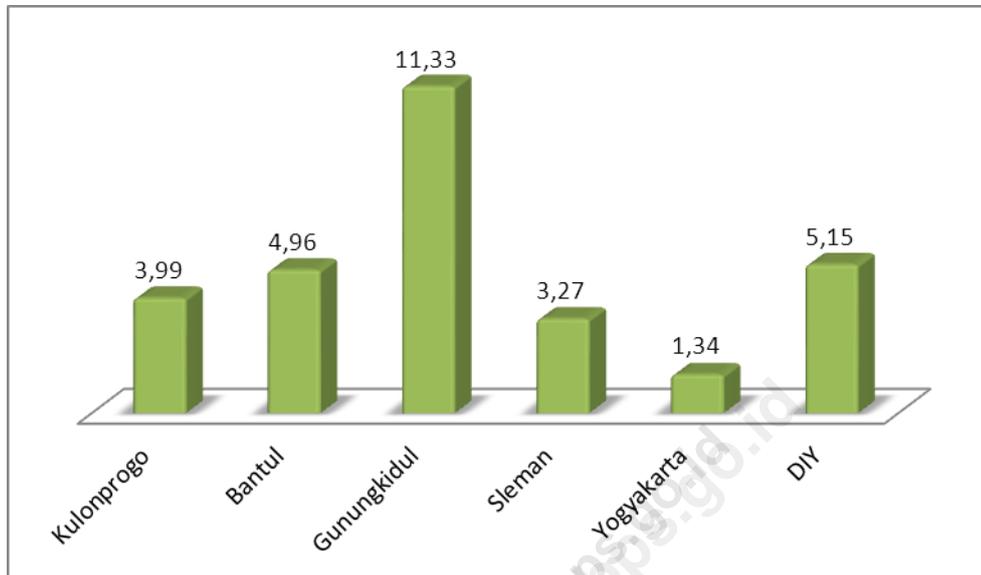
Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, persentase penduduk yang memiliki ijazah/STTB tertinggi pendidikan menengah (SMA) ke atas pada umumnya sudah lebih dari 30 persen, kecuali Kabupaten Gunungkidul (21,23 persen). Di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta persentase penduduk yang memiliki ijazah/STTB tertinggi pendidikan menengah ke atas bahkan sudah mencapai di atas 45 persen, yaitu masing-masing 45,46 persen dan 45,72 persen (Tabel 6.15).

Kemampuan membaca dan menulis huruf latin dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia dari aspek pendidikan. Semakin banyak penduduk yang dapat membaca dan menulis, maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2016 penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin tercatat sebanyak 96,83 persen.

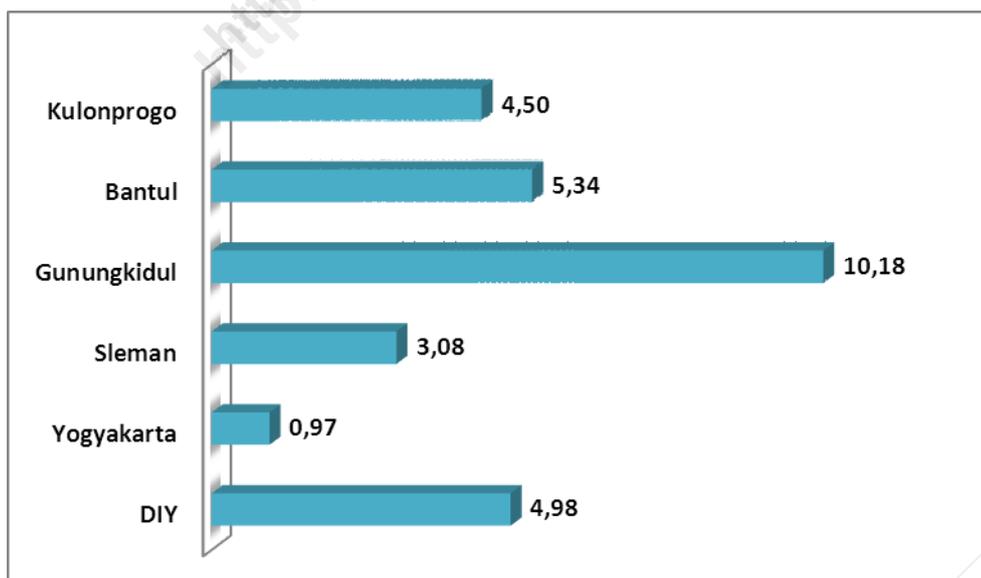
Jika dilihat menurut kabupaten/kota penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin terbanyak tercatat di Kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 99,57 persen, selanjutnya Kabupaten Sleman 98,63 persen, sedangkan paling sedikit ada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu tercatat sebanyak 91,83 persen (Tabel 6.19).

Sebaliknya, persentase penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) sebesar 2,56 persen. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota persentase terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 6,68 persen, sedangkan yang terendah ada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 0,43 persen (Tabel 6.19).

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 6.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, 2016



Tabel 6.1 Persentase Penduduk 7-24 Tahun menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
7 – 12	53,95	46,05	100,00
13 – 15	49,37	50,63	100,00
16 – 18	50,88	49,12	100,00
19 – 24	50,22	49,78	100,00
Jumlah	51,37	48,63	100,00

Tabel 6.2 Persentase Penduduk 7-24 tahun menurut Golongan Umur, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah	Kelompok Umur			
	7 -12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
Belum/Tidak pernah bersekolah	0,00	0,22	0,28	0,00
Masih Sekolah	100,00	99,78	86,04	51,66
Tidak Bersekolah Lagi	0,00	0,00	13,68	48,34
Perempuan				
Belum/Tidak pernah bersekolah	0,34	0,00	0,00	0,43
Masih Sekolah	99,66	99,46	88,40	48,22
Tidak Bersekolah Lagi	0,00	0,54	11,40	51,35
Laki-laki + Perempuan				
Belum/Tidak pernah bersekolah	0,16	0,11	0,14	0,21
Masih Sekolah	99,84	99,62	87,20	49,95
Tidak Bersekolah Lagi	0,00	0,27	12,66	49,84

Tabel 6.3 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Bersekolah dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Partisipasi Bersekolah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Belum/Tidak pernah Bersekolah	2,54	7,67	5,15
Masih Sekolah	22,92	20,16	21,51
Tidak Bersekolah Lagi	74,54	72,17	73,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.4 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Bersekolah			Jumlah
	Belum/Tidak Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Kulonprogo	1,72	20,18	78,10	100,00
Bantul	2,24	20,77	76,98	100,00
Gunungkidul	6,83	16,27	76,89	100,00
Sleman	1,30	27,50	71,20	100,00
Yogyakarta	0,36	28,70	70,94	100,00
D.I. Yogyakarta	2,54	22,92	74,54	100,00

Tabel 6.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Bersekolah			Jumlah
	Belum/Tidak Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	6,15	18,43	75,42	100,00
Bantul	7,61	18,50	73,89	100,00
Gunungkidul	15,44	13,65	70,91	100,00
Sleman	5,26	23,51	71,23	100,00
Yogyakarta	2,25	27,85	69,90	100,00
D.I. Yogyakarta	7,67	20,16	72,17	100,00

Tabel 6.6 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Bersekolah di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Bersekolah			Jumlah
	Belum/Tidak Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	3,99	19,29	76,73	100,00
Bantul	4,96	19,62	75,41	100,00
Gunungkidul	11,33	14,91	73,77	100,00
Sleman	3,27	25,52	71,21	100,00
Yogyakarta	1,34	28,26	70,40	100,00
D.I. Yogyakarta	5,15	21,51	73,34	100,00

Tabel 6.7 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	99,27	99,15	99,21
SMP	80,83	85,22	83,05
SMA	68,63	69,31	69,86

Tabel 6.8 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/ belum pernah sekolah	2,54	7,67	5,15
SD	6,07	4,67	5,36
SMP	4,60	4,55	4,58
SMA	4,82	4,01	4,41
D-I s,d, Universitas	7,43	6,92	7,17
Tidak bersekolah lagi	74,54	72,17	73,34
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.9 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di D,I,Yogyakarta, 2016

Status Pendidikan	Laki-Laki					
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum pernah sekolah	1,72	2,24	6,83	1,30	0,36	2,54
SD	6,13	6,71	6,89	5,58	4,52	6,07
SMP	4,75	5,28	5,08	3,91	4,03	4,60
SMA	6,97	3,97	3,03	4,96	7,30	4,82
D-I s,d, Universitas	2,33	4,81	1,28	13,05	12,85	7,43
Tidak bersekolah lagi	78,10	76,98	76,89	71,20	70,94	74,54
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.10 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di D.I.Yogyakarta, 2016

Status Pendidikan	Perempuan					
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum pernah sekolah	6,15	7,61	15,44	5,26	2,25	7,67
SD	5,53	4,27	4,89	4,97	3,59	4,67
SMP	4,52	4,76	5,48	3,78	4,57	4,55
SMA	3,93	4,30	2,67	4,19	5,31	4,01
D-I s,d, Universitas	4,45	5,17	0,61	10,58	14,38	6,92
Tidak bersekolah lagi	75,42	73,89	70,91	71,23	69,90	72,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.11 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di D.I.Yogyakarta, 2016

Status Pendidikan	Laki-Laki+Perempuan					
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum pernah sekolah	3,99	4,96	11,33	3,27	1,34	5,15
SD	5,82	5,47	5,85	5,28	4,04	5,36
SMP	4,64	5,02	5,29	3,84	4,31	4,58
SMA	5,41	4,14	2,84	4,57	6,27	4,41
D-I s,d, Universitas	3,42	4,99	0,93	11,82	13,64	7,17
Tidak bersekolah lagi	76,73	75,41	73,77	71,21	70,40	73,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.12 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,54	7,67	5,15
Tidak/Blm Tamat SD	12,61	13,28	12,95
SD	22,99	22,36	22,67
SMP	14,57	13,83	14,19
SMA	23,54	21,42	22,46
SMK	12,55	8,96	10,72
DIPLOMA I/II	0,47	0,94	0,71
DIPLOMA III/Sarmud	2,36	2,82	2,59
Universitas/D4 ke Atas	8,36	8,73	8,55
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.13 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/	Laki-Laki					
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,72	2,24	6,83	1,30	0,36	2,54
Tidak/Belum Tamat SD	14,44	15,77	17,33	8,66	6,80	12,61
SD	30,12	24,70	34,00	14,44	17,95	22,99
SMP	12,65	15,47	16,80	13,80	12,75	14,57
SMA	17,35	21,83	14,69	27,71	36,60	23,54
SMK	15,89	10,57	6,54	17,75	9,12	12,55
DIPLOMA I/II	0,27	0,19	0,54	0,76	0,40	0,47
DIPLOMA III/Sarmud	0,83	1,94	0,56	4,12	2,88	2,36
Universitas/D4 ke Atas	6,72	7,28	2,71	11,47	13,14	8,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.14 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/	Perempuan					
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Pernah Sekolah	6,15	7,61	15,44	5,26	2,25	7,67
Tdk/Blm Tamat SD	17,49	14,22	17,11	10,84	6,99	13,28
SD	29,92	21,26	31,69	14,65	21,95	22,36
SMP	9,35	16,30	14,41	14,26	10,41	13,83
SMA	16,49	20,03	11,94	26,94	30,99	21,42
SMK	11,01	9,86	4,46	11,17	6,80	8,96
DIPLOMA I/II	0,92	0,78	0,87	0,88	1,56	0,94
DIPLOMA III/Sarmud	2,18	2,32	1,27	4,15	3,64	2,82
Universitas/D4 ke Atas	6,48	7,61	2,80	11,84	15,41	8,73
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.15 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki+Perempuan					
	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Pernah Sekolah	3,99	4,96	11,33	3,27	1,34	5,15
Tdk/Blm Tamat SD	16,00	14,99	17,22	9,74	6,90	12,95
SD	30,02	22,96	32,80	14,54	20,02	22,67
SMP	10,96	15,89	15,55	14,03	11,54	14,19
SMA	16,91	20,92	13,26	27,33	33,70	22,46
SMK	13,39	10,21	5,45	14,48	7,92	10,72
Diploma I/II	0,61	0,49	0,71	0,82	1,00	0,71
Diploma III/Sarmud	1,52	2,13	0,93	4,14	3,28	2,59
Universitas/D4 ke Atas	6,60	7,45	2,75	11,65	14,31	8,55
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.16 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta, 2016

Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Huruf Latin	96,83	90,87	93,80
Huruf Arab	45,93	43,92	44,91
Huruf Lainnya	24,61	23,18	23,88
Tidak dapat	2,56	7,32	4,98

Tabel 6.17 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca Menulis di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf				Laki-Laki
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Tidak Dapat	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	
Kulonprogo	97,74	35,68	23,13	1,80	
Bantul	96,67	43,58	20,79	2,76	
Gunungkidul	91,83	46,20	25,78	6,68	
Sleman	98,63	49,04	28,49	0,97	
Yogyakarta	99,57	52,13	21,88	0,43	
D.I.Yogyakarta	96,83	45,93	24,61	2,56	

Tabel 6.18 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca Menulis di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf			
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	91,34	34,77	20,63	7,07
Bantul	90,47	42,19	20,81	7,85
Gunungkidul	83,20	40,94	22,10	13,39
Sleman	93,43	47,77	26,34	5,21
Yogyakarta	97,80	51,61	24,39	1,47
D.I. Yogyakarta	90,87	43,92	23,18	7,32

Tabel 6.19 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca Menulis di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf			
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	94,46	35,21	21,85	4,50
Bantul	93,53	42,88	20,80	5,34
Gunungkidul	87,33	43,45	23,86	10,18
Sleman	96,04	48,41	27,42	3,08
Yogyakarta	98,66	51,87	23,18	0,97
D.I.Yogyakarta	93,80	44,91	23,88	4,98

VII. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, juga sebagai lambang status sosial. Keberadaan rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar seluruh fungsi dan kegunaan rumah dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu kelengkapan fasilitas perumahan dapat juga dijadikan sebagai indikator keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Selain itu informasi tentang perumahan menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat telah menikmati rumah.

Dalam kegiatan Susenas dikumpulkan beberapa informasi penting mengenai keadaan perumahan, meliputi: status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan.

Ditinjau dari luas lantai, rumah tangga yang sehat akan mempunyai luas lantai yang memadai dengan jumlah penghuninya. Luas lantai yang ditempati rumah tangga dapat dijadikan pendekatan dalam menilai kesejahteraan rumah tangga.

Di D.I.Yogyakarta, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sekitar 12,67 persen, sedangkan yang menempati rumah dengan luas

lantai 100 meter persegi atau lebih sekitar 37,61 persen (lihat Tabel 7.1).

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik pula keadaan sosial ekonomi suatu rumah tangga.

Secara umum penduduk D.I.Yogyakarta bertempat tinggal di rumah yang beratap genteng (95,20 persen), berlantai bukan tanah (94,98 persen), dan berdinding tembok (92,20 persen).

Berdasarkan penggunaan jenis atap terluas, maka untuk atap genteng, semua kabupaten Kulonprogo persentasenya sudah 98,17 persen bahkan terendah Kota Yogyakarta 81,76 persen. (Tabel 7.2).

Apabila dilihat berdasarkan jenis lantai terluas yang ditempati, sebagian besar rumah tangga di D.I.Yogyakarta menempati rumah yang berlantai bukan tanah. Persentase penggunaan lantai bukan tanah di D.I.Yogyakarta sudah mencapai 94,48 persen. Persentase tertinggi rumah tangga dengan jenis lantai terluas bukan tanah ada di Kota Yogyakarta dan yang terendah ada di Kabupaten Kulonprogo dengan persentase masing-masing 99,74 persen dan 84,56 persen.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur berdasarkan penggunaan jenis dinding, yaitu berupa tembok. Berdasarkan Susenas 2016, sebanyak 92,20 persen rumah

tangga menempati rumah berdinding tembok, dengan persentase tertinggi di Kabupaten Sleman (99,05 persen), dan terendah di Kabupaten Kulonprogo (79,79 persen). Penggunaan kayu dan bambu sebagai dinding rumah di Kabupaten Kulonprogo masih cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 6,48persen dan 13,37 persen. Penggunaan bambu sebagai dinding rumah di Kabupaten Gunungkidul juga masih cukup tinggi yaitu mencapai 11,25 persen.

Gambaran mengenai penggunaan jenis atap, lantai dan dinding rumah dapat dilihat pada Tabel 7.2, Tabel 7.3, dan Tabel 7.4.

Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Sedangkan kualitas air yang diminum sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Sumber air minum yang sampai saat ini masih dianggap terbaik adalah air dalam kemasan, karena sifatnya yang higienis. Namun air dalam kemasan baru dikonsumsi oleh 22,87 persen dari seluruh rumah tangga di D.I.Yogyakarta.

Di D.I Yogyakarta, sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah sumur terlindung mencapai 41,75 persen. Berikutnya adalah air kemasan sebanyak 22,87 persen. Penggunaan air kemasan sebagai air minum terbanyak ada Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman yaitu masing-masing sebesar 46,86 persen dan 30,41 persen (Tabel 7.5).

Di Kabupaten Gunungkidul, penggunaan air hujan, air sungai dan mata air sebagai sumber air minum cukup tinggi, yaitu mencapai 26,22 persen. Hal ini dikarenakan

wilayah ini sering mengalami kekeringan pada musim kemarau sehingga pada saat penghujan mereka menampung air untuk digunakan .

Konsep Sumber air minum bersih, yang digunakan meliputi ledeng meteran, ledeng eceran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumber bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinjanya minimal 10 meter.

Di D.I.Yogyakarta, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih (layak) sesuai konsep di atas mencapai 86,22 persen. Adapun Kabupaten yang paling banyak menggunakan sumber air minum bersih adalah Kota Yogyakarta sebesar 99,54 persen. Paling sedikit di kabupaten Gunungkidul 68,54 persen.

Jarak sumber air minum (yang berasal dari pompa, sumur atau mata air) ke tempat penampungan kotoran sangat mempengaruhi kualitas air minum. Jarak yang sehat antara sumber air minum dan tempat penampungan kotoran adalah minimal 10 meter. Berdasarkan Susenas 2016, ada sekitar 22,34 persen rumah tangga yang jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan kotoran/tinja kurang atau sama dengan 10 meter (Tabel 7.6).

Dilihat menurut kabupaten/kota, persentase terbesar rumah tangga yang sumber air minumnya berjarak kurang dari atau sama dengan 10 meter adalah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 31,42 persen.

Tabel 7.7 menunjukkan sebagian besar rumah tangga mempunyai fasilitas air minum sendiri (71,90 persen), dengan persentase terbesar di Kabupaten Sleman (76,75 persen), dan terendah di Kota Yogyakarta (60,03 persen). Sedangkan yang tidak mempunyai fasilitas air minum sebesar 0,80persen, berada di Kabupaten Gunungkidul (3,15 persen).

Sebagian besar rumah tangga memperoleh air minum dengan cara tidak membeli (63,78 persen). Persentase tertinggi di Kabupaten Kulonprogo sebesar 73,17 persen, dan terendah di Kota Yogyakarta sebesar 43,29persen (Tabel 7.8).

Jika dilihat menurut fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di D.I Yogyakarta sudah mempunyai fasilitas sendiri (77,26 persen). Sementara itu fasilitas tempat buang air besar dengan persentase terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul (86,12 persen) dan terendah di Kota Yogyakarta (59,19 persen). Sementara itu rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar banyak terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul, masing-masing sebesar 3,02 persen, 2,14 persen (Tabel 7.9).

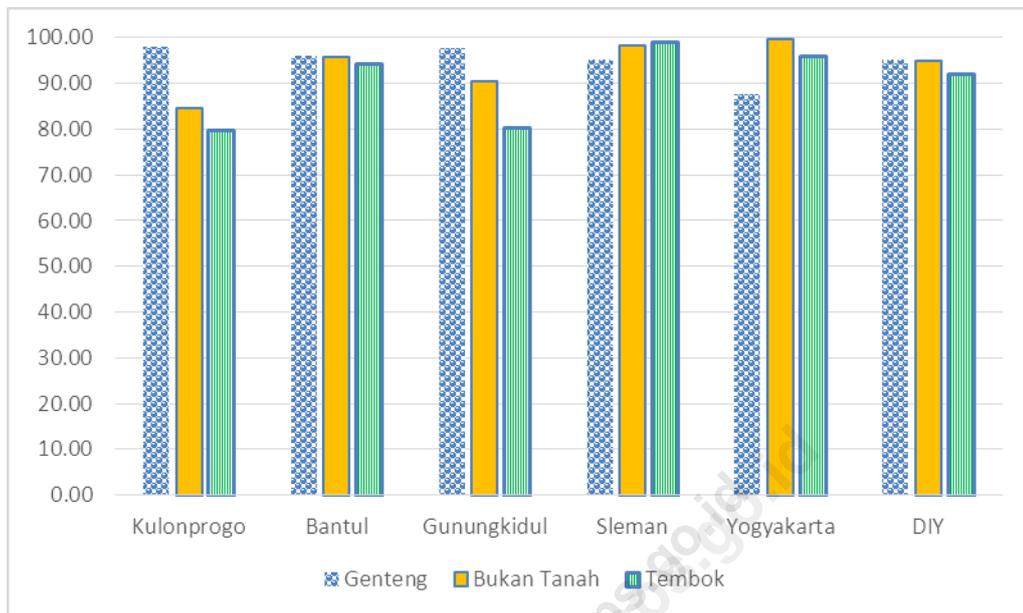
Tabel 7.10 memperlihatkan persentase rumahtangga yang menggunakan jamban leher angsa sebesar 96,25 persen, cemplung/cubluk sebesar 3,28 persen, plengsengan dengan tutup sebesar 0,26 persen plengsengan tanpa tutup 0,21 persen. Penggunaan jenis kloset leher angsa banyak dijumpai di Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, yaitu masing-masing sebesar 99,63 persen, 99,21 persen dan 97,92 persen. Sementara

jenis kloset cemplung/cubluk banyak dijumpai di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, masing-masing sebesar 9,38 persen dan 8,14 persen.

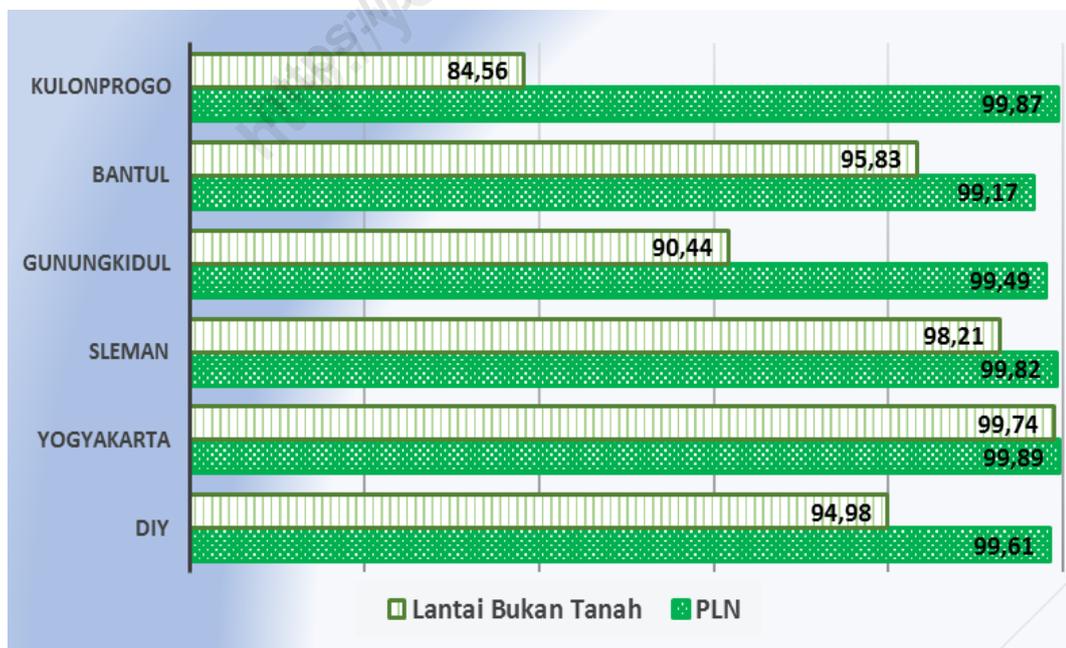
Tangki septik dengan dasar semen dan tanpa dasar semen merupakan tempat penampungan akhir tinja yang banyak digunakan rumah tangga yaitu sebesar 78,69 persen yang menggunakan IPAL 8,37 persen (Tabel 7.11). Namun masih dijumpai rumahtangga yang menggunakan Sungai /Danau/Laut, Kolam/Sawah, Pantai/Tanah Lapang/ Kebun sebagai tempat penampungan akhir tinja. Listrik merupakan sumber penerangan yang lebih baik dibandingkan dengan jenis penerangan lainnya. Hal ini disebabkan listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Dari Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa penggunaan listrik PLN hampir merata di seluruh kabupaten/kota yaitu lebih dari 99,61 persen. Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (*handphone*), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Tabel 7.13 menunjukkan sekitar 47,24 persen rumah tangga di D.I Yogyakarta memiliki Kulkas, 81,72 persen memiliki Sepeda Motor , 25,55 persen memiliki perhiasan emas min 10 gram, dan 14,66 persen memiliki Mobil (Tabel 7.13).

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap, Lantai, Dinding, dan Kabupaten/Kota 2016



Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN, Lantai Bukan Tanah menurut Kabupaten/Kota, 2016



Tabel 7.1 Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Luas Lantai Rumah Tempat Tinggal di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Rata-rata Luas Lantai Rumah (m ²)				Jumlah
	< 20	20 - 49	50 - 99	≥ 100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	0,02	6,59	40,48	52,92	100,00
Bantul	3,88	17,20	46,98	31,94	100,00
Gunungkidul	0,25	6,11	47,31	46,33	100,00
Sleman	16,11	11,06	35,14	37,69	100,00
Yogyakarta	31,70	21,79	22,34	24,17	100,00
D.I. Yogyakarta	10,55	12,67	39,18	37,61	100,00

Tabel 7.2 Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas				Jumlah
	Beton	Genteng	Asbes	Seng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	0,52	98,17	1,09	0,22	100,00
Bantul	0,85	95,95	2,69	0,50	100,00
Gunungkidul	0,45	97,63	1,29	0,63	100,00
Sleman	1,95	95,34	2,43	0,29	100,00
Yogyakarta	2,40	87,76	6,33	3,51	100,00
D.I. Yogyakarta	1,31	95,20	2,67	0,83	100,00

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan dan Jenis Lantai Terluas di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas		Jumlah
	Bukan Tanah	Tanah	
(1)	(2)	(3)	(5)
Kulonprogo	84,56	15,44	100,00
Bantul	95,83	4,17	100,00
Gunungkidul	90,44	9,56	100,00
Sleman	98,21	1,79	100,00
Yogyakarta	99,74	0,26	100,00
D.I. Yogyakarta	94,98	5,02	100,00

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan dan Jenis Dinding Terluas di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas				Jumlah
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	79,79	6,48	13,37	0,00	100,00
Bantul	94,22	2,37	2,82	0,59	100,00
Gunungkidul	81,20	6,27	11,25	1,29	100,00
Sleman	99,05	0,21	0,74	0,00	100,00
Yogyakarta	96,17	1,03	2,08	0,74	100,00
D.I. Yogyakarta	92,20	2,61	4,70	0,48	100,00

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di D.I.Yogyakarta, 2016

Sumber Air Minum	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air Kemasan	12,42	18,04	4,28	30,41	46,86	22,87
Ledeng	12,33	8,57	24,44	3,94	7,97	10,23
Pompa	4,85	13,16	8,79	10,79	18,05	11,37
Sumur terlindung	41,92	51,36	31,03	46,35	26,66	41,75
Sumur tak terlindung	11,01	3,42	5,24	4,08	0,46	4,37
Mata Air, Sungai, Air Hujan	17,47	5,45	26,22	4,44	0,00	9,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jarak Penampungan			Jumlah
	≤ 10 m	> 10 m	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	16,94	82,89	0,16	100,00
Bantul	31,42	67,29	1,29	100,00
Gunungkidul	11,53	87,37	1,10	100,00
Sleman	18,42	79,26	2,32	100,00
Yogyakarta	31,12	62,05	6,82	100,00
D.I. Yogyakarta	22,34	75,64	2,01	100,00

Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Air Minum di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Fasilitas Air Minum				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	69,41	25,99	4,30	0,29	100,00
Bantul	74,73	19,79	5,22	0,26	100,00
Gunungkidul	68,17	23,69	4,98	3,15	100,00
Sleman	76,75	21,64	1,61	0,00	100,00
Yogyakarta	60,03	31,39	8,58	0,00	100,00
D.I. Yogyakarta	71,90	23,02	4,29	0,80	100,00

Tabel 7.8 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Cara Memperoleh Air Minum		Jumlah
	Membeli	Tidak Membeli	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	26,83	73,17	100,00
Bantul	27,88	72,13	100,00
Gunungkidul	37,69	62,31	100,00
Sleman	36,50	63,50	100,00
Yogyakarta	56,71	43,29	100,00
D,I Yogyakarta	36,22	63,78	100,00

Tabel 7.9 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada/Tidak digunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	82,02	15,29	0,57	2,11	100,00
Bantul	80,02	16,54	1,31	2,14	100,00
Gunungkidul	88,12	10,42	0,20	1,26	100,00
Sleman	74,95	21,30	0,73	3,02	100,00
Yogyakarta	59,19	36,35	4,45	0,00	100,00
D.I. Yogyakarta	77,26	19,51	1,26	1,98	100,00

Tabel 7.10 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset				Jumlah
	Leher Angsa/ Plengsengan Dengan tutup	Plengsengan Tanpa tutup	Cemplung/ Cubluk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	91,13	0,58	0,14	8,14	100,00
Bantul	97,92	0,08	0,00	2,00	100,00
Gunungkidul	89,07	0,47	1,08	9,38	100,00
Sleman	99,21	0,13	0,00	0,66	100,00
Yogyakarta	99,63	0,37	0,00	0,00	100,00
D.I. Yogyakarta	96,25	0,26	0,21	3,28	100,00

Tabel 7.11 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di D.I.Yogyakarta, 2016

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tangki dengan dasar Semen	36,95	50,44	21,22	65,61	41,39	47,54
Tangki tanpa dasar Semen	41,41	37,18	45,49	22,24	14,28	31,15
Ipal	0,96	6,93	0,24	3,84	39,26	8,37
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	3,58	2,68	0,23	5,14	5,06	3,46
Lubang Tanah	16,70	2,77	31,67	1,39	0,00	8,64
Pantai/Tanah lapang/Kebun	0,40	0,00	0,10	0,00	0,00	0,06
Lainnya	0,00	0,00	1,04	1,79	0,00	0,78
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7.12 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan			Jumlah
	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan Listrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	99,87	0,00	0,13	100,00
Bantul	99,17	0,83	0,00	100,00
Gunungkidul	99,49	0,51	0,00	100,00
Sleman	99,82	0,06	0,12	100,00
Yogyakarta	99,89	0,00	0,11	100,00
D.I. Yogyakarta	99,61	0,32	0,07	100,00

Tabel 7.13 Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Aset yang Dimiliki			
	Tabung gas 5,5 kg/Lebih	Lemari Es / Kulkas	AC	Pemanas Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	11,99	40,78	1,89	0,44
Bantul	12,89	48,06	4,26	1,24
Gunungkidul	5,06	28,36	1,18	1,75
Sleman	24,73	57,31	8,39	4,18
Yogyakarta	13,97	51,50	11,86	3,93
D.I. Yogyakarta	15,42	47,24	5,83	2,58

Tabel 7.13 Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Lanjutan

Kabupaten/ Kota	Jenis Aset yang Dimiliki				
	Emas/Perhiasan (Minimal 10 gram)	Sepeda Motor	Komputer/ laptop	Perahu Motor	Mobil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	22,84	80,93	23,95	0,25	9,57
Bantul	25,95	83,78	26,17	0,05	13,49
Gunungkidul	14,77	72,64	11,60	0,00	9,08
Sleman	30,42	85,04	47,72	0,16	19,66
Yogyakarta	29,49	82,55	54,51	0,12	16,10
D.I. Yogyakarta	25,55	81,72	34,18	0,11	14,66

VIII. KONSUMSI/PENGELUARAN

Tingkat konsumsi/pengeluaran rumah tangga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Secara asumsi linier semakin besar tingkat konsumsi/pengeluaran rumah tangga merupakan implikasi dari meningkatnya pendapatan rumahtangga. Selanjutnya peningkatan pendapatan menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 8.1 memperlihatkan bahwa rata-rata perkapita rumahtangga sebulan untuk makanan 40,52 persen dan bukan makanan sebesar 59,48 persen. Adanya kecenderungan semakin tinggi golongan pengeluaran, maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk bukan makanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran (proksi pendapatan), maka semakin tinggi pula porsi yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan (semakin rendah porsi pengeluaran untuk makanan). Hal ini selaras dengan Hukum Engel.

Persentase pengeluaran untuk kelompok makanan terbesar adalah pada makanan dan minuman jadi dan padi-padian. Pada rincian pengeluaran bukan makanan terlihat bahwa pengeluaran rata-rata untuk aneka barang dan jasa dan perumahan serta bahan bakar merupakan pengeluaran terbesar dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya.

Tingginya pengeluaran makanan jadi dan lebih rendahnya pengeluaran padi-padian kemungkinan ini diduga disebabkan terjadinya

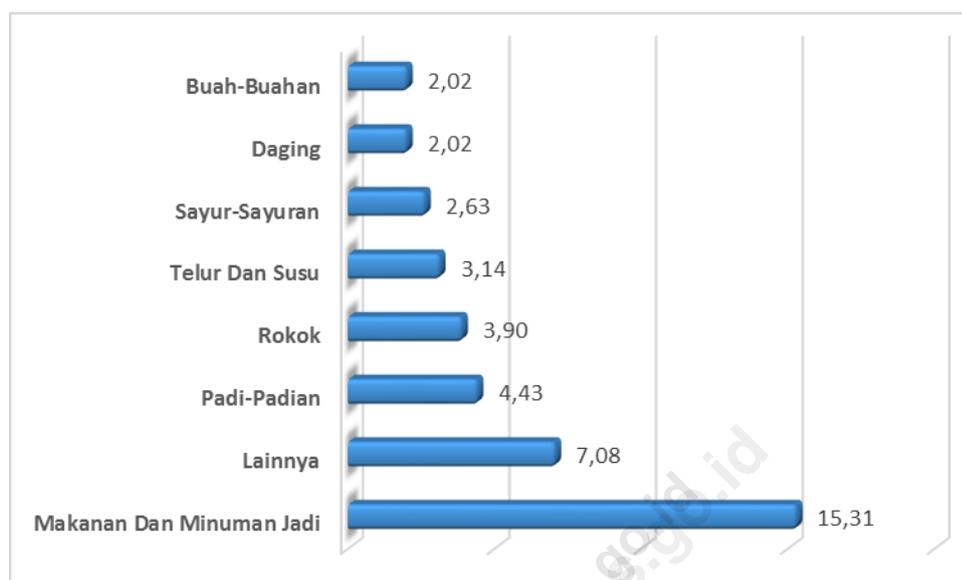
pola pergeseran gaya hidup yaitu masyarakat dituntut untuk bergaya hidup lebih praktis. Sedangkan tingginya konsumsi bukan makanan terbanyak adalah pengeluaran Perumahan dan Bahan Bakar.

Tabel 8.2 memperlihatkan persentase penduduk di D.I.Yogyakarta menurut tipe daerah dan golongan pengeluaran perkapita sebulan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa modus rata-rata pengeluaran penduduk perkapita sebulan adalah pada golongan pengeluaran antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 499.999,- baik untuk penduduk perkotaan maupun pedesaan, dengan persentase sebesar 23,31 dan 30,25 persen.

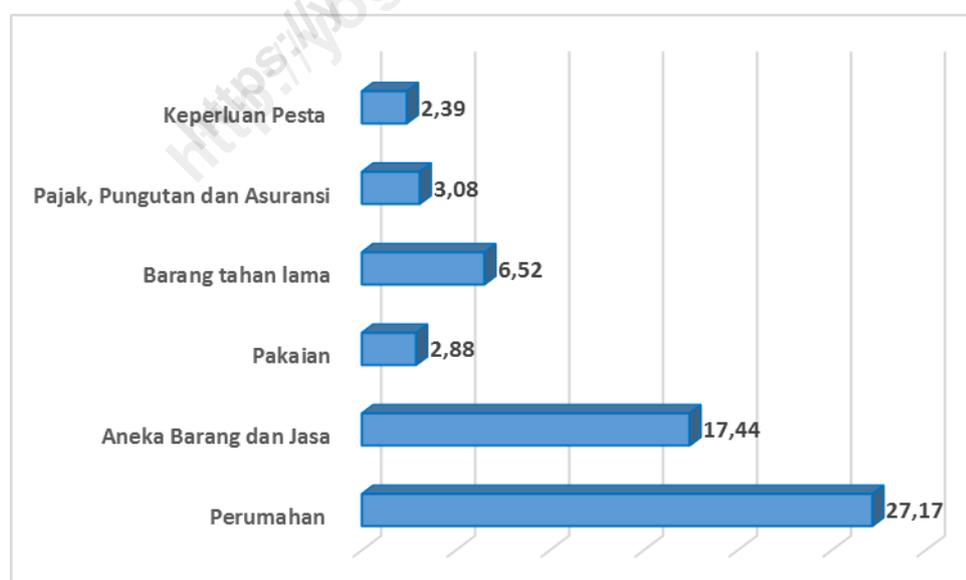
Apabila dilihat menurut tipe ~~ini~~, maka terlihat persentase di daerah pedesaan pada golongan pengeluaran Rp.200.000 sampai dengan Rp.299.000,- berada sedikit dibawah golongan pengeluaran Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 499.999,- yaitu 8,93 persen, sedangkan pengeluaran perkapita terkecil pada golongan pengeluaran Rp 150.000,- sampai dengan Rp.199.999,-, yaitu hanya 3,02 persen di pedesaan.

Di daerah perkotaan, terlihat golongan pengeluaran perkapita terbesar ada pada golongan \geq Rp.1000.000 yaitu sebesar 50,46 persen, sedangkan golongan pengeluaran perkapita terkecil ada pada golongan pengeluaran Rp.200.000.-299.999 dengan persentase sebesar 4,45persen.

Gambar 8.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan terhadap Total Makanan, 2016



Gambar 8.2 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Kelompok Non Makanan terhadap Total Non Makanan, 2016



Tabel 8.1 Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)			
	< 100.000	100.000-149.999	150.000-199.999	200.000-299.999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Makanan				
Padi-padian	0,00	0,00	17,57	13,92
Umbi-umbian	0,00	0,00	0,62	0,46
Ikan	0,00	0,00	2,50	1,21
Daging	0,00	0,00	1,31	2,13
Telur dan Susu	0,00	0,00	5,77	3,61
Sayur-sayuran	0,00	0,00	8,29	5,89
Kacang-kacangan	0,00	0,00	3,08	2,53
Buah-buahan	0,00	0,00	1,60	1,28
Minyak dan lemak	0,00	0,00	3,11	2,73
Bahan minuman	0,00	0,00	4,25	3,51
Bumbu-bumbuan	0,00	0,00	1,90	1,26
Konsumsi lainnya	0,00	0,00	1,93	1,49
Makanan & Minuman Jadi	0,00	0,00	9,11	14,11
Minuman alkohol	0,00	0,00	0,00	0,00
Tembakau dan sirih	0,00	0,00	3,54	5,97
Jumlah Makanan	0,00	0,00	64,58	60,09

Tabel 8.1 Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I.Yogyakarta, 2016

Lanjutan

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)			
	< 100.000	100.000-149.999	150.000-199.999	200.000-299.999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Bukan Makanan				
Perumahan dan bahan bakar	0,00	0,00	21,60	24,17
Aneka barang dan jasa	0,00	0,00	8,79	9,41
Pakaian, alas kaki & tutup kepala	0,00	0,00	2,25	2,42
Barang tahan lama	0,00	0,00	0,55	1,16
Pajak dan asuransi	0,00	0,00	1,81	2,30
Keperluan pesta dan upacara	0,00	0,00	0,42	0,46
Jumlah Bukan Makanan	0,00	0,00	35,42	39,91

Tabel 8.1 Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I.Yogyakarta, 2016

Lanjutan

Kelompok Barang/	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)				Rata-rata
	300.000- 499.999	500.000- 749.999	750.000- 999.999	≥ 1.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Makanan					
Padi-padian	10,06	7,16	7,07	2,80	4,43
Umbi-umbian	0,51	0,54	0,39	0,26	0,33
Ikan	1,54	1,80	2,09	1,49	1,56
Daging	2,04	2,44	2,73	1,89	2,02
Telur dan Susu	3,51	3,97	3,93	2,88	3,14
Sayur-sayuran	4,92	3,98	4,52	1,88	2,63
Kacang-kacangan	2,21	1,96	2,00	0,82	1,18
Buah-buahan	1,81	2,06	2,32	2,03	2,02
Minyak dan lemak	2,22	1,70	2,05	0,66	1,04
Bahan minuman	2,97	2,51	2,74	1,13	1,60
Bumbu-bumbuan	1,14	0,98	0,91	0,44	0,61
Konsumsi lainnya	1,39	1,18	1,35	0,55	0,76
Makanan & Minuman Jadi	15,15	16,52	15,04	15,20	15,31
Minuman alkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tembakau dan sirih	6,55	5,80	5,66	3,06	3,90
Jumlah Makanan	56,01	52,59	52,80	35,11	40,52

Tabel 8.1 Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I.Yogyakarta, 2016

Lanjutan

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)				Rata-rata
	300.000 – 499.999	500.000 – 749.999	750.000 – 999.999	≥ 1.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Bukan Makanan					
Perumahan dan bahan bakar	25,32	26,23	25,40	27,78	27,17
Aneka barang dan jasa	11,00	12,24	11,13	19,81	17,44
Pakaian, alas kaki & tutup kepala	2,63	2,66	2,60	2,99	2,88
Barang tahan lama	1,76	2,72	4,74	8,03	6,52
Pajak dan asuransi	2,49	2,42	2,31	3,34	3,08
Keperluan pesta dan upacara	0,78	1,14	1,02	2,95	2,39
Jumlah Bukan Makanan	43,99	47,41	47,20	64,89	59,48

Tabel 8.2 Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Tipe Daerah di D.I.Yogyakarta, 2016

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
< 100.000	-	-	-
100.000 - 149.999	-	-	-
150.000 - 199.999	-	3,02	0,96
200.000 - 299.999	4,75	8,93	6,08
300.000 - 499.999	23,31	30,25	25,53
500.000 - 749.999	19,62	18,95	19,40
750.000 - 999.999	1,36	19,32	7,10
≥ 1.000.000	50,96	19,54	40,92
Jumlah	100,00	100,00	100,00

<http://yogyakarta.bps.go.id>

IX. KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA LAINNYA

Dalam kuesioner Kor Susenas 2016 dicakup beberapa pertanyaan sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan monitoring kebijakan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pertanyaan tersebut di antaranya mengenai pelayanan kesehatan, pembelian beras murah/raskin, dan bantuan kredit usaha. Berikut uraian singkat gambaran kondisi ekonomi penduduk dilihat dari karakteristik di atas.

9.1. Pelayanan Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan adalah dengan memberikan jaminan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau subsidi. Terkait program tersebut pemerintah mendistribusikan kartu kepada rumah tangga miskin sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut, salah satunya Kartu Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Selain kartu tersebut, ada pula jenis jaminan sosial yaitu Jaminan Pensiun/Veteran, Jaminan hari tua, Asuransi kecelakaan kerja, Jaminan/asuransi Kematian, Pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK)

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa di D.I. Yogyakarta terdapat 8,82 persen rumah tangga mendapatkan Jaminan pensiun/veteran penerima pensiun/veteran selama 1 tahun terakhir, dengan persentase tertinggi di

Kabupaten Kulonprogo (10,44 persen) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul (4,85 persen).

Tabel 9.1 juga memperlihatkan rumah tangga yang mendapat pelayanan jaminan asuransi /kematian 1 tahun terakhir sebelum pencacahan. Persentase rumah tangga yang pernah mendapat jaminan asuransi/kematian paling banyak Kabupaten Sleman (2,63 persen). Sementara itu kategori PHK juga menunjukkan persentase yang cukup besar di Kabupaten Sleman yaitu 1,44 persen. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, persentase rumah tangga yang mendapatkan PHK menunjukkan pola yang hampir sama.

9.2. Beras Murah/Raskin

Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog/Dolog) melaksanakan program pengadaan beras murah atau beras miskin (raskin) yang ditujukan bagi masyarakat miskin agar tercukupi kebutuhan pangannya. Tabel 9.2 menunjukkan bahwa sekitar 42,65 persen rumah tangga yang membeli beras murah/raskin selama 3 bulan terakhir dengan persentase tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (82,07 persen) dan yang terendah di Kota Yogyakarta (14,49 persen).

Pada umumnya rumah tangga yang membeli beras murah/raskin kurang atau sama dengan 10 kg selama 3 bulan referensi. Rumah

tangga yang membeli beras raskin 11-30 kg, banyak dijumpai di Kabupaten Gunungkidul yaitu 79,55 persen. Sementara di Kota Yogyakarta rumah tangga yang membeli beras raskin 11-30 kg hanya sekitar 44,84 persen. Pada umumnya harga beras murah/raskin yang dibeli rumah tangga antara Rp 1.745,- sampai Rp 1.890 per kg (Pedoman Umum raskin, harga per kg adalah Rp. 1.600).

Sedangkan harga rata-rata beras miskin yang dibeli rumah tangga adalah Rp 1.841,-. Apabila dilihat per kabupaten/kota harga beras miskin tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Di semua kabupaten/kota rata-rata harga beras murah/raskin sekitar Rp. 1.745,- sampai Rp. 1.890,-.

9.3. Kredit Usaha

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah mencanangkan program pemberian kredit usaha yang ditujukan kepada masyarakat ekonomi rendah dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian kredit tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha skala kecil. Tabel 9.4 menunjukkan bahwa jenis kredit usaha yang paling banyak diterima rumah tangga adalah dari KUR (6,35 persen), kemudian diikuti lainnya (5,01 persen), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (3,99 persen). Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, jenis kredit usaha yang diterima rumahtangga sangat bervariasi.

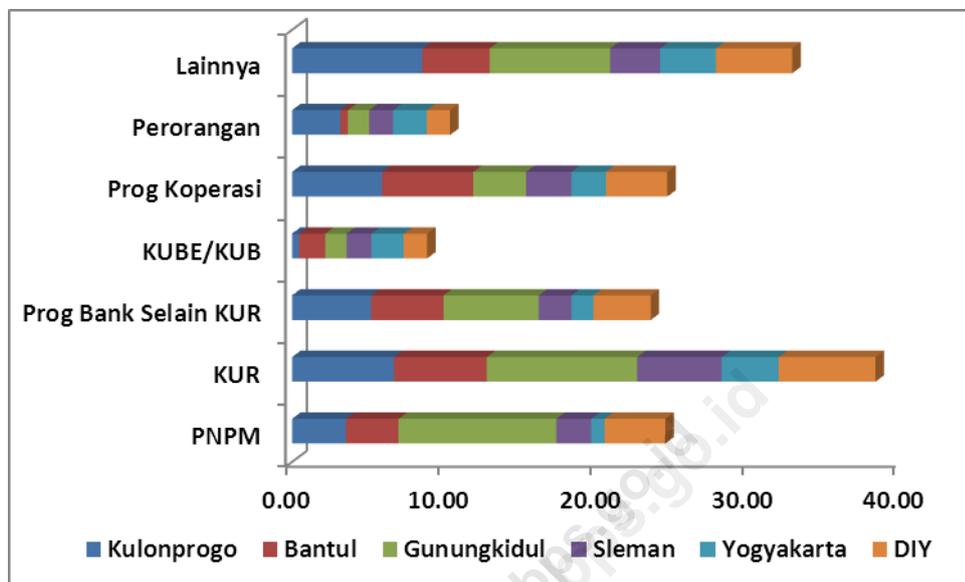
9.4. Lainnya

Dalam Kuesioner Susenas 2016 juga dicakup pertanyaan mengenai penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan selama setahun terakhir, dan penduduk yang melakukan kegiatan bepergian selama 3 bulan kalender dalam referensi survei.

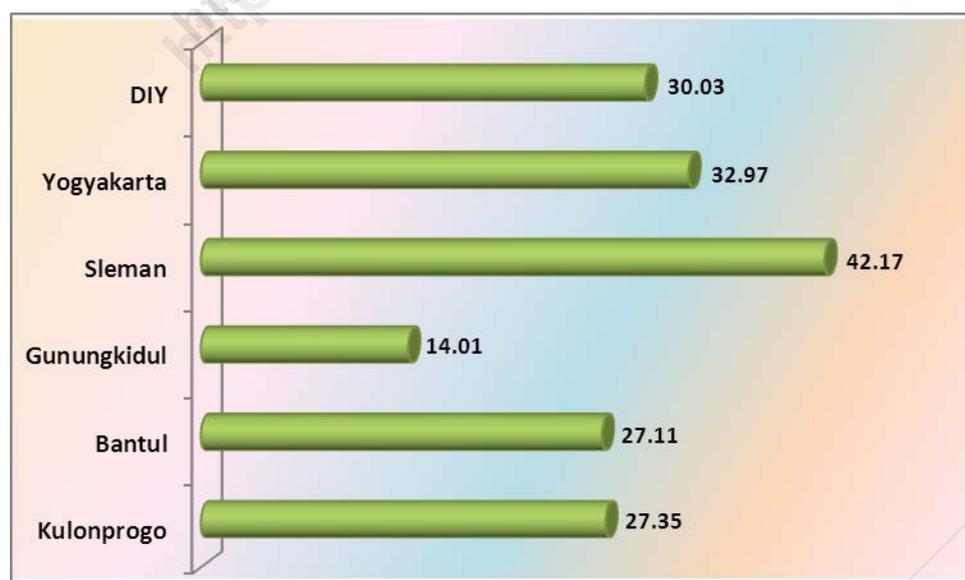
Tabel 9.5 Secara umum menunjukkan sebanyak 1,17 persen penduduk menjadi korban tindak kejahatan selama setahun terakhir. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota terlihat di Kota Yogyakarta lebih dari 2 persen penduduknya menjadi korban tindak kejahatan, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul paling rendah penduduknya yang menjadi korban tindak kejahatan (0,30 persen). Dilihat menurut jenis kelamin, ternyata laki-laki lebih banyak yang menjadi korban kejahatan dibanding perempuan.

Penduduk yang melakukan kegiatan bepergian selama 3 bulan waktu survei sebanyak 30,03 persen. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota penduduk yang melakukan perjalanan paling banyak di Kabupaten Sleman yaitu 42,17 persen dan Kota Yogyakarta 32,97 persen. Sedangkan yang paling sedikit melakukan bepergian selama 1 April sampai dengan 30 Juni 2016 adalah penduduk di Kabupaten Gunungkidul yaitu hanya 14,01 persen (Tabel 9.6).

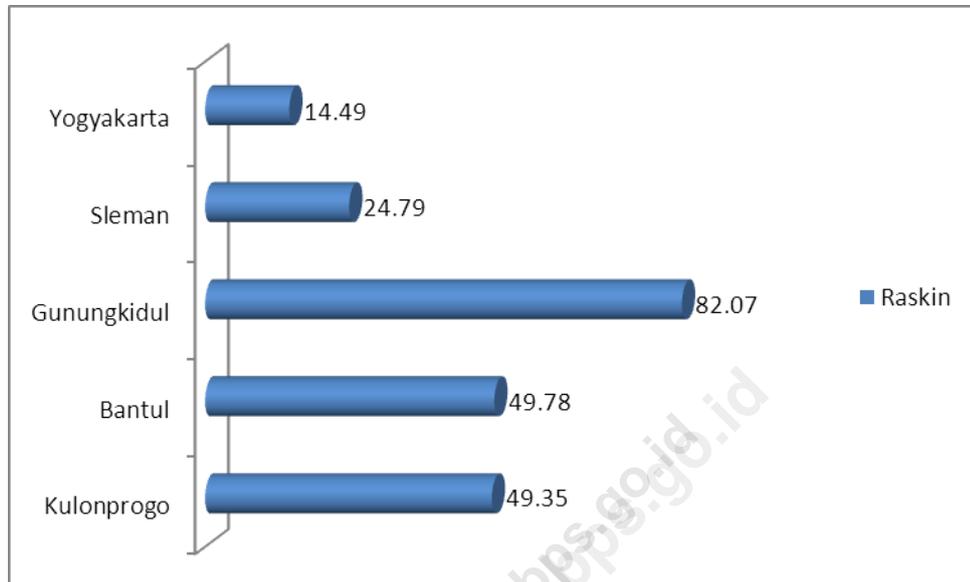
Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga yang kredit usaha selama setahun terakhir menurut Kabupaten/ Kota, 2016



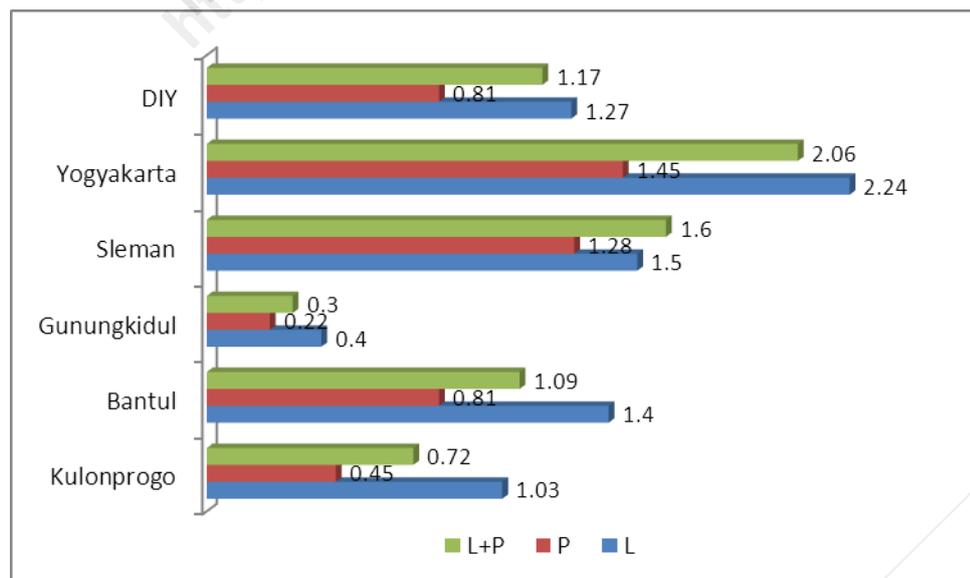
Gambar 9.2 Persentase Penduduk yang bepergian 1 April-30 Juni 2016 Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 9.3 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Beras Murah/Raskin menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 9.4 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, 2016



Tabel 9.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun/Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/Asuransi Kematian	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	10,44	2,82	3,89	1,44	1,07
Bantul	9,98	5,52	4,86	1,67	0,68
Gunungkidul	4,85	1,96	2,16	1,14	1,24
Sleman	10,36	3,70	4,25	2,63	1,44
Yogyakarta	7,65	1,69	1,63	0,28	0,23
D.I. Yogyakarta	8,92	3,48	3,64	1,68	1,01

Tabel 9.2 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Beras Murah/Raskin Selama 3 Bulan Referensi menurut Jumlah Beras yang Dibeli dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang Membeli Beras Murah/Raskin	Jumlah Beras yang Dibeli (kg)			Jumlah
		≤ 10	11-30	≥ 31	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	49,35	4,79	58,99	36,22	100,00
Bantul	49,78	8,35	67,69	23,97	100,00
Gunungkidul	82,07	17,53	79,55	2,93	100,00
Sleman	24,79	13,63	67,74	18,62	100,00
Yogyakarta	14,49	2,37	44,84	52,79	100,00
D.I. Yogyakarta	42,65	11,83	69,70	18,47	100,00

Tabel 9.3 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Beras Murah/Raskin Selama 3 Bulan Referensi menurut Harga Beras per Kg dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Harga Beras per Kg (Rp)			Jumlah/	Harga Rata-rata Per Kg (Rp)
	≤ 1.000	1.001 - 2000	≥ 2001		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	0,00	73,82	26,18	100,00	1.890
Bantul	0,00	93,56	6,44	100,00	1.807
Gunungkidul	0,20	99,80	0,00	100,00	1.865
Sleman	0,00	100,00	0,00	100,00	1.859
Yogyakarta	0,00	95,12	4,88	100,00	1.745
D.I. Yogyakarta	0,07	94,65	5,28	100,00	1.841

Tabel 9.4 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di D.I.Yogyakarta, 2016

Jenis Kredit Usaha	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)	3,54	3,46	10,35	2,29	0,88	3,99
2. KUBE/KUB	0,48	1,70	1,40	1,64	2,12	1,55
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6,70	6,09	9,88	5,55	3,74	6,35
4. Program Bank selain KUR	5,19	4,76	6,25	2,14	1,44	3,77
5. Program Koperasi	5,91	6,00	3,46	2,97	2,26	4,04
6. Perorangan	3,17	0,49	1,41	1,57	2,22	1,52
7. Lainnya	8,57	4,41	7,91	2,29	3,66	5,01

Tabel 9.5 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Kulonprogo	1,03	0,45	0,72
Bantul	1,40	0,81	1,09
Gunungkidul	0,40	0,22	0,30
Sleman	1,50	1,28	1,60
Yogyakarta	2,24	1,45	2,06
D.I.Yogyakarta	1,27	0,81	1,17

Tabel 9.6 Persentase Penduduk yang bepergian 1 April – 30 Juni 2016 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2016

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Kulonprogo	28,17	26,56	27,35
Bantul	27,84	26,39	27,11
Gunungkidul	14,40	13,64	14,01
Sleman	42,07	42,26	42,17
Yogyakarta	33,11	32,84	32,97
D.I.Yogyakarta	30,52	29,55	30,03

<http://yogyakarta.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Telp.(0274)4342234 Fax.(0274) 4342230 email: bps3400@mailhost.go.id

ISSN 2460-2140



9 772460 214006